

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kawasan Indo-Pasifik

Istilah Indo-Pasifik pertama kali disebutkan oleh ahli geopolitik Jerman Karl Haushover pada tahun 1920 dalam tulisan akademiknya yaitu “Indopazifischen Raum”.⁵⁰ Namun, konsep yang dicetuskan Karl tidak begitu populer secara geopolitik dan strategis. Terlihat pada tahun 1960-an pasca Perang Dunia II, istilah Asia-Pasifik mendominasi konsepsi Asia dengan kekuatan tunggal negara Amerika Serikat.⁵¹ Asia-Pasifik meliputi wilayah yang menghubungkan Timur Laut, Asia Tenggara, Oceania (Australia) dan Amerika Serikat (AS). Sebagian besar tujuan gagasan ini adalah untuk mencerminkan dan memperkuat peran strategis dan ekonomi AS yang penting di Asia serta keberhasilan negara-negara industri Asia Timur sebagai mitra dagang AS.

Pasca perang dunia II (1960-an), konsep Asia-Pasifik mulai goyah disebabkan setidaknya oleh empat faktor yang muncul pada 1990-an. Pertama, penyebutan “Asia” dirasa terlalu luas, heterogen dan berkonotasi kontinental dari pada maritim, sementara sebutan “Asia Pasifik” juga hanya menunjuk bagian Asia di Samudra Pasifik terasa tidak memadai. Sebutan “Indo-Pacific” (gabungan dari Indian Ocean dan Pacific Ocean) dirasa memadai dan mewakili kebutuhan tersebut. Kedua, bangkitnya India sebagai kekuatan ekonomi dan militer yang substansial dengan kepentingan di luar Asia Selatan. Pada abad ke-21, India memiliki pertumbuhan ekonomi yang impresif pada dekade 1990-an dan pengembangan senjata nuklirnya. Kebangkitan India menjadi faktor kunci dalam meningkatnya signifikansi Samudra Hindia sehingga tidak dapat lagi diabaikan dalam pembicaraan ekonomi maupun

⁵⁰ Karl, Haushover. (1924). *Geopolitik des Pazifischen Ozeans: Studien über die Wechselbeziehungen zwischen Geographie und Geschichte*. Berlin: Mit sechzehn Karten und Tafeln Grunewald.

⁵¹ theasanforum.org. (2015). *Reimagining Asia: From Asia-Pacific to Indo-Pacific*. Diakses pada 26 Juni 2015

politik terkait kawasan Asia Pasifik.⁵² Pengakuan akan pentingnya posisi India nampak dalam keterlibatan dalam *ASEAN Regional Forum* (1996) dan *East Asia Summit* (2005) serta partisipasi kunci dalam US IndoPacific Command (USINDOPACOM).⁵³

Ketiga, meningkatnya koneksi antara kekuatan ekonomi Asia Timur dan wilayah Samudra Hindia terutama dengan permintaan energi dan sumber daya lainnya. Misalnya Jepang menggunakan jalur *Indian Ocean Regional* (IOR) sebagai transportasi lautnya dalam kebutuhan energi dan impor makanan. Untuk memperkuat peran keamanan maritim, Jepang membangun hubungan kerja sama dengan India dan semakin jelas bahwa penanganan di IOR dan *West Pasific* tidak dapat dipisahkan. Sikap Jepang diperjelas dengan pidato PM Shinzo Abe di depan Parlemen India (2007) mengenai:

““Confluence of the Indian and Pacific Oceans" as "the dynamic coupling as seas of freedom and of prosperity" in the "broader Asia".⁵⁴

Pesan PM Shinzo menggaris bawahi kepentingan Jepang dan signifikansi India dalam mempertahankan kepentingan tersebut, yang diformulasikan dalam penyatuan term geopolitik “Indo-Pasifik”.

“The Pacific and the Indian Oceans are now bringing about a dynamic coupling as seas of freedom and of prosperity. A "broader Asia" that broke away geographical boundaries is now beginning to take on a distinct form. Our two countries have the ability -- and the responsibility - - to ensure that it broadens yet further and to nurture and enrich these seas to become seas of clearest transparence.”

Keempat, Hadirnya China sebagai negara baru dengan tingkat perekonomian yang kuat di kawasan Indo-Pasifik. China bahkan tengah menjadi ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat hanya dalam beberapa tahun. China bahkan tengah meningkatkan ketegasan politik-militernya sehingga mengakibatkan peningkatan hubungan antara India dan Jepang sejak tahun 2006. Berikut beberapa wilayah yang

⁵² G. S. Khurana. (2017). *The 'Indo-Pacific' Concept: Retrospect and Prospect*. National Maritime Foundation. Hlm.3

⁵³ U.S. Indo-Pacific Command. (2022). *UNISDOPACOM Area Of Responbity..* Diakses pada 01 Januari 2022

⁵⁴ *Lop.Cit.* Hlm 4.

mencakup ekonomi terbesar dunia yakni Amerika Serikat, China dan Jepang. Selain itu terdapat enam negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia antaranya yaitu India, Kamboja, Laos, Myanmar, Nepal, dan Filipina.

Tabel 3. Top Ten Countries by Nominal GDP at Current U.S. Dollar Exchange Rates

Country	Nominal GDP (in trillions)	PPP Adjusted GDP (in trillions)	Annual Growth (%)	GDP Per Capita (in thousands)
United States	\$20.89	\$20.89	-3.6%	\$63,413.5
China	\$14.72	\$24.27	2.3%	\$10,434.8
Japan	\$5.06	\$5.25	-4.6%	\$40,193.3
Germany	\$3.85	\$4.52	-4.6%	\$46,208.4
United Kingdom	\$2.76	\$3.08	-9.7%	\$41,124.5
India	\$2.66	\$8.97	-7.3%	\$1,927.7
France	\$2.63	\$3.15	-7.9%	\$39,030.4
Italy	\$1.89	\$2.49	-8.9%	\$31,714.2
Canada	\$1.64	\$1.83	-5.3%	\$43,258.2
South Korea	\$1.64	\$2.24	-0.9%	\$31,631.5

Sumber: Investopedia (2021)

Dengan empat faktor tersebut, maka istilah kawasan Asia-Pasifik berganti menjadi kawasan Indo-Pasifik. Secara biogeografis penyebutan istilah Indo-Pasifik akan menunjuk suatu area yang sangat luas dari kawasan Hindia hingga Lautan Pasifik. Samudra Hindia adalah lautan ketiga terbesar di dunia (setelah Pasifik dan Atlantik). Samudra Hindia menempati sekitar 20 persen permukaan laut Bumi, yang meliputi area total 73,56 juta mil persegi.⁵⁵

⁵⁵ D.Michel dan R. Sticklor. (2012). *In Indian Ocean Rising: Maritime and Security Policy Challenges*. Washington DC: Stimson

Sedangkan Samudra Pasifik memiliki luas sekitar 63,8 juta mil persegi (165,25 juta km persegi). Samudra Pasifik jauh sangat lebih luas dibanding Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Samudra Pasifik membentang dari pantai Antartika ke Selat Bering hingga 135° garis lintang, sekitar 15.600 mil (15.500 km). Luas memanjang terbesarnya adalah sekitar 19.000 mil (19.300 km) di sepanjang garis lintang 5°LU, antara pantai-pantai Kolombia di Amerika Selatan dan Semenanjung Melayu di Asia. Kedalaman rata-rata adalah 14.040 kaki (4.280 meter), dan kedalaman terbesar yang diketahui adalah 36.201 kaki (11.034 meter) yakni di Palung Mariana.⁵⁶

Gambar 4. Tata Letak dan Nilai Strategis Indo-Pasifik bagi Negara



Sumber: Gopalswamy (2013)

Dengan begitu dapat diketahui bahwa Setidaknya ada lebih dari 50 negara yang berada pada lingkaran Indo-Pasifik. Hal ini juga dijelaskan dalam *World Wide Fund* dan *Nature Conservancy* membagi kawasan yang disebut Indo-Pasifik dalam tiga area beserta negara-negarannya, yaitu:

⁵⁶ Britannica.com. Pacific Ocean

1. Indo-Pasifik Tengah termasuk sejumlah laut dan selat yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik termasuk laut di sekitar kepulauan Indonesia, Laut China Selatan, Laut Filipina, pantai utara Australia, laut sekitar New Guinea, Mikronesia barat dan tengah, New Caledonia, Kep Solomon, Vanuatu, Fiji dan Tonga. Karena letaknya sebagai pertemuan dua samudra Indo-Pasifik Tengah mempunyai kekayaan terumbu karang dan mangrove yang besar.
2. Indo-Pasifik bagian Timur di sekitar kepulauan vulkanik Samudra Pasifik dari Kep. Marshall Polinesia bagian tengah dan tenggara hingga P. Easter dan Hawaii.
3. Indo-Pasifik Barat yang meliputi bagian barat dan tengah Samudra Hindia termasuk pantai timur Afrika, Laut Merah, Teluk Aden, Teluk Persia, Laut Arab, Teluk Bengal dan lautan Andaman termasuk perairan pantai sekitar Madagaskar, Seychelles, Comoros, Kep Mascarene, Maldives dan Kep Chagos.

Dalam bidang ekonomi, wilayah Samudra Hindia mengandung banyak mineral, minyak, dan gas alam. Negara-negara bagian kawasan Samudra Hindia memiliki lebih dari dua pertiga cadangan minyak dunia yang diketahui. Sehingga wilayah Samudra Hindia diyakini kaya dengan cadangan energi.⁵⁷ Setidaknya 35 persen cadangan gas dunia, 60 persen uranium, 40 persen emas, 80 persen dari semua cadangan intan dan sejumlah besar berbagai zat mineral lainnya.⁵⁸ Sebagian besar negara bagian Samudra Hindia terus mengekspor bahan mentah dan mengimpor barang-barang manufaktur yang diproduksi di tempat lain, dengan beberapa pengecualian seperti Australia, India dan Afrika Selatan. Minyak mendominasi perdagangan karena Samudra Hindia telah menjadi jalur penting untuk pengangkutan minyak mentah ke Eropa, Amerika Utara dan Asia Timur.

Komoditas utama lainnya termasuk besi, batu bara, karet dan teh. Makanan laut olahan telah muncul sebagai barang ekspor utama dari negara-negara pesisir.

⁵⁷ *cfr.org. (2014). from The New Geopolitics of China, India, and Pakistan Competition in the Indian Ocean. Diakses pada 29 Oktober 2014*

⁵⁸ Future Directions International. (2012). *Indian Ocean: A Sea of Uncertainty*. West Perth: Future Directions International

Selain itu, pariwisata telah menjadi semakin penting di banyak pulau.⁵⁹ Samudra Hindia juga menyediakan rute pelayaran internasional yang penting seperti: Oman, Yaman, Somalia, India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, dan Indonesia adalah negara pesisir yang mengelilingi Samudra.⁶⁰ Pengiriman di Samudera Hindia dapat dibagi menjadi tiga komponen: dhow, pengangkut kargo kering, dan tanker. Samudra Hindia memiliki empat dari enam chokepoint utama maritim dan berfungsi sebagai jalan raya super maritim untuk sumber daya energi yang dibutuhkan yang menggerakkan perekonomian terbesar dunia.⁶¹ Hampir 68 persen minyak India, 80 persen minyak China dan 25 persen minyak Amerika Serikat dikirim dari wilayah Samudera Hindia.

Sedangkan di kawasan Samudra Pasifik sejak pertengahan abad ke-20 telah terjadi pertumbuhan luar biasa dalam perdagangan antara Lingkar Pasifik barat. Terutama China, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Amerika Utara dan tidak tertinggal Amerika Serikat. Perdagangan juga telah berkembang antara Amerika Utara dan negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina dan Indonesia. Pada wilayah Pasifik barat perdagangan meningkat antara Jepang dan Korea Selatan.⁶² Dengan demikian, Samudra Pasifik mendukung beberapa rute perdagangan paling penting di dunia.

Berdasarkan hasil analisis dokumen yang dilakukan Nashir Komeini, dan Rosdiana menunjukkan bahwa Indo-Pasifik merupakan rumah bagi 10 dari 20 ekonomi dengan pertumbuhan tercepat.⁶³ Sehingga, Indo-Pasifik saat ini mengandung lebih dari sepertiga Produk Domestik Bruto (PDB) global. Oleh sebab itu, Indo-Pasifik diproyeksikan mampu menyumbang lebih dari 55 persen dari PDB global pada tahun 2050. Hal ini terjadi dikarenakan sebagian besar disebabkan oleh

⁵⁹Britannica.com. Philomene A Verlaan. (2021). *Indian Ocean Encyclopedia.. Diakses pada 13 Desember 2021. <https://www.britannica.com/place/Indian-Ocean>*

⁶⁰ Tertia, J., & Perwita, A. A. (2018). Maritime Security In Indo-Pacific: Issues, Challenges And Prospects. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. Hlm 77-95

⁶¹ Ismah, Rustam, . (2016). Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita- cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Indonesian Perspective*. Vol.1 No.1. Hlm 1–21.

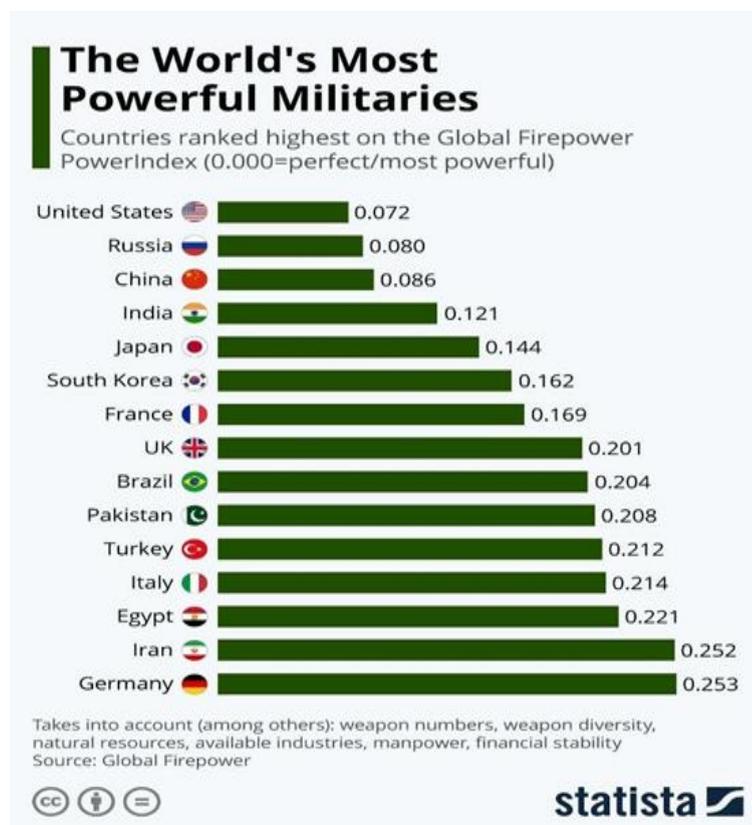
⁶² Charles Henry Cotter. (2019). *Pacific Ocean*. Britannica.com

⁶³Asep Kamaluddin Nashir, Yugolastarob Komeini dan Hesti Rosdiana.(2021). Strategic Environment, Strategist, and Strategy. *Jurnal Global & Strategis*. Vol. 15. No.1. Hlm 103.

kelas menengah yang tumbuh. Pendatang kelas menengah berikutnya akan datang dari Indo-Pasifik dengan jumlah 87 persen dari satu miliar. Lebih tepatnya dari kelas menengah dunia akan tinggal di Indo-Pasifik yang akan mewakili jumlah daya beli taktertandingi. Singkatnya, pasarpotensial dan prosek ekonomi menghadirkan peluang yang semua bisa mendapat manfaat selama semua negara.⁶⁴

Dalam bidang Pertahanan (militer) di kawasan Indo-Pasifik terus mengalami peningkatan dan persaingan. Terlebih kekayaan yang dikandung kawasan Indo-Pasifik memaksa tiap-tiap negara yang berada di lingkaran kawasan saling memperkuat pertahanan negaranya masing-masing. Peralnya kepemilikan militer yang baik akan menjadi daya jual atau daya saing untuk mempertahankan kedaulatan serta pengakuan dari negara lain. Oleh karenanya masing-masing negara memastikan untuk memperkuat kapabilitas militer dari anggaran hingga kemampuan alat utama sistem pertahanan (alutsista)

Gambar 5. Besar Peringkat Kekuatan Militer



⁶⁴ P, Davidson. (2019). Introduction to the Indo-Pacific Security Challenges. *Journal of Indo-Pacific Affairs*. Vol. 2. No. 1

Sumber: Statista (2021)

Pada tingkat kebijakan luar negeri, negara-negara yang melindungi wilayah asal mereka kemudian mengejar kontrol pertahanan kekuatan relatif mereka. Batas wilayah negara mendorong negara untuk melewati perbatasan untuk menjaga keamanan dan kontrol tata letak rute perdagangan atau kondisi geografis seperti daratan atau laut. Terlebih sistem internasional hanya sebagai seperangkat aturan atau pola perilaku yang kaku dan memaksa kekuatan untuk menyeimbangkan kekuatan lain. Ketidakjelasan dan ketidakamanan ini yang kian terus merubah arah gerak konsep kawasan Indo-Pasifik. Hal ini di karenakan ruang-ruang kawasan Indo-pasifik disesuaikan oleh kepentingan masing-masing negara di kawasan Indo-Pasifik.

4.2 Perbedaan Konsepsi Kawasan Indo-Pasifik

Dengan menariknya kawasan Indo-Pasifik secara geostrategis dan geoekonomi kian menarik perhatian banyak negara-negara yang berada di dalam lingkaran kawasan maupun di luar lingkaran kawasan Indo-Pasifik untuk melakukan berbagai intervensi wilayah. Dibuktikan dengan berbagai macamnya istilah penyebutan konsep dan skema kawasan Indo-Pasifik.

- ***Free and Open Indo-Pacific (FOIP) (Jepang)***

Konsep Indo-Pasifik pertama kali secara implisit muncul dalam kebijakan luar negeri Jepang sebagai the confluence of two seas sebagaimana disebut oleh Perdana Menteri Shinzo Abe tahun 2007. Namun demikian, istilah Indo-Pasifik pertama kali secara eksplisit dinyatakan oleh Perdana Menteri Abe saat mengumumkan konsep Free and Open Indo-Pacific (FOIP) di forum Tokyo International Conference of Africa's Development (TICAD) IV di Kenya pada bulan Agustus 2016.⁶⁵

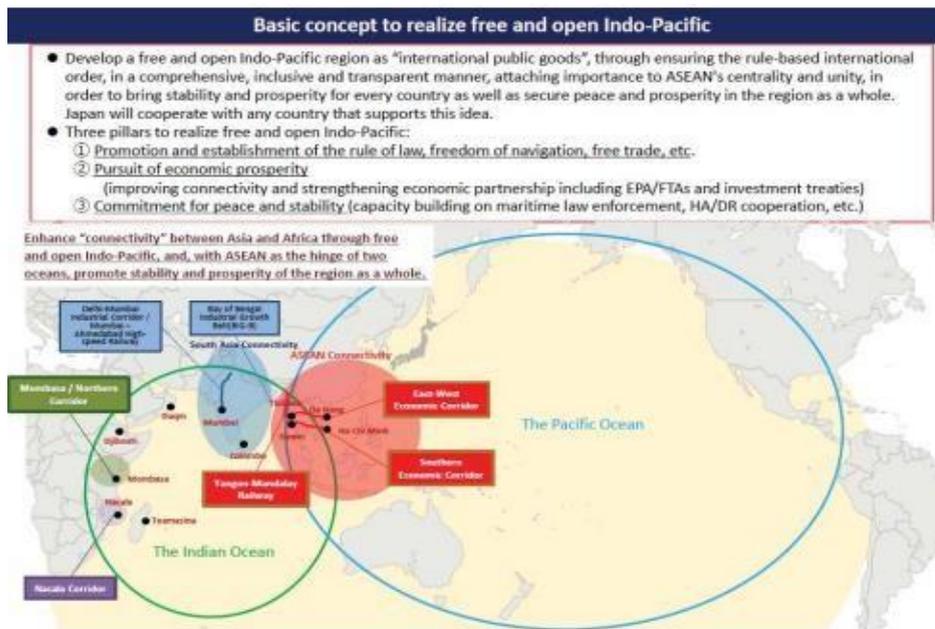
Berdasarkan 2017 Diplomatic Bluebook, Jepang mengkonseptualisasikan IndoPasifik sebagai kawasan yang mencakup wilayah Samudera Hindia dan bagian barat dari Samudera Pasifik, termasuk Asia Tenggara, Asia Selatan, dan sebagian Timur Tengah dan negara-negara pesisir Afrika Timur.⁶⁶ Konseptualisasi ini

⁶⁵ Ministry of Foreign Affairs. (2019)

⁶⁶ Ministry of Foreign Affairs. (2018). Hlm 21

kemudian mengalami perluasan sejalan dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Taro Kono yang memasukkan Amerika Selatan ke dalam Indo-Pasifik (World Economic Forum, 2018). Konseptualisasi ini kemudian meluas lagi dengan masuknya China ke dalam peta Indo-Pasifik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jepang tahun 2019.

Gambar 6. Konsep-Konsep Dasar dalam Mewujudkan FOIP Jepang



Sumber: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta (2019)

Skema FOIP meliputi tiga dimensi utama, yaitu: (1). Promosi dan penegakan prinsip-prinsip hukum (rule of law), kebebasan navigasi (freedom of navigation), perdagangan bebas (free trade) dan lain-lain; (2). Kemakmuran ekonomi (pursuit of economic prosperity); dan (3). Komitmen terhadap perdamaian dan stabilitas (commitment for peace and prosperity).

- ***Free and Open Indo-Pacific (FOIP) - Amerika Serikat***

Istilah Indo-Pasifik pertama kali masuk ke dalam kosa kata kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) pada tahun 2010 ketika Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menyampaikan pidato mengenai United States Pivot to Asia. Istilah tersebut muncul kembali dalam pidato Presiden Donald Trump di APEC CEO Summit pada November 2017 yang menyebutkan:

"vision for a free and open Indo-Pacific a place where sovereign and independent nations, with diverse cultures and many different dreams, can all prosper side-by-side, and thrive in freedom and in peace".⁶⁷

Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson pada bulan November 2017 menyebut Indo-Pasifik secara geografis sebagai wilayah yang meliputi Samudera Hindia, Pasifik bagian barat dan negara-negara yang berada di sekitarnya.⁶⁸ Cakupan geografis tersebut mirip dengan cakupan yang dirujuk pada konsep Indo-Pasifik India dan Jepang. Namun demikian, satu bulan kemudian dalam National Security Strategy, cakupan geografis konsep Indo-Pasifik AS mengalami perubahan menjadi wilayah yang meliputi pantai barat India hingga pantai barat AS.⁶⁹ Definisi ini menjadikan konsep Indo-Pasifik AS secara geografis menjadi lebih dekat dengan konsep Indo-Pasifik Australia ketimbang India dan Jepang.

Gambar 7. Cakupan Wilayah Indo-Pasifik dalam FOIP (AS)



Sumber: US Indo-Pacific Command (2017)

⁶⁷ Asean.usmission.gov. (2017). *Remarks by President Trump at APEC CEO Summit*. Diakses pada 11 November 2017

⁶⁸ CSIS. (2017). *Japan's role in Asia's connectivity: Infrastructure finance and digital governance*. Center for Strategic and International Studies.

⁶⁹ White House. (2017). *National Security Strategy of the United States of America*. Washington: White House. Hlm 45-46

Beberapa pengamat melihat skema FOIP AS berpusat pada kerja sama *Quadrilateral Security Dialogue* (Quad) yang didominasi pertimbangan geopolitik antara AS, Jepang, India dan Australia. Namun demikian, beberapa dokumen resmi yang dikeluarkan terkait FOIP (AS) menunjukkan adanya strategi yang lebih komprehensif dari sekedar pertimbangan geopolitik meski dimensi geopolitik masih nampak dominan. Sejak 2017, AS mengeluarkan beberapa dokumen terkait FOIP. Pada tanggal 1 Juni 2019, Kementerian Pertahanan AS mengeluarkan dokumen "Indo-Pacific Strategy Report. Preparedness, Partnerships, and Promoting a Networked Region".

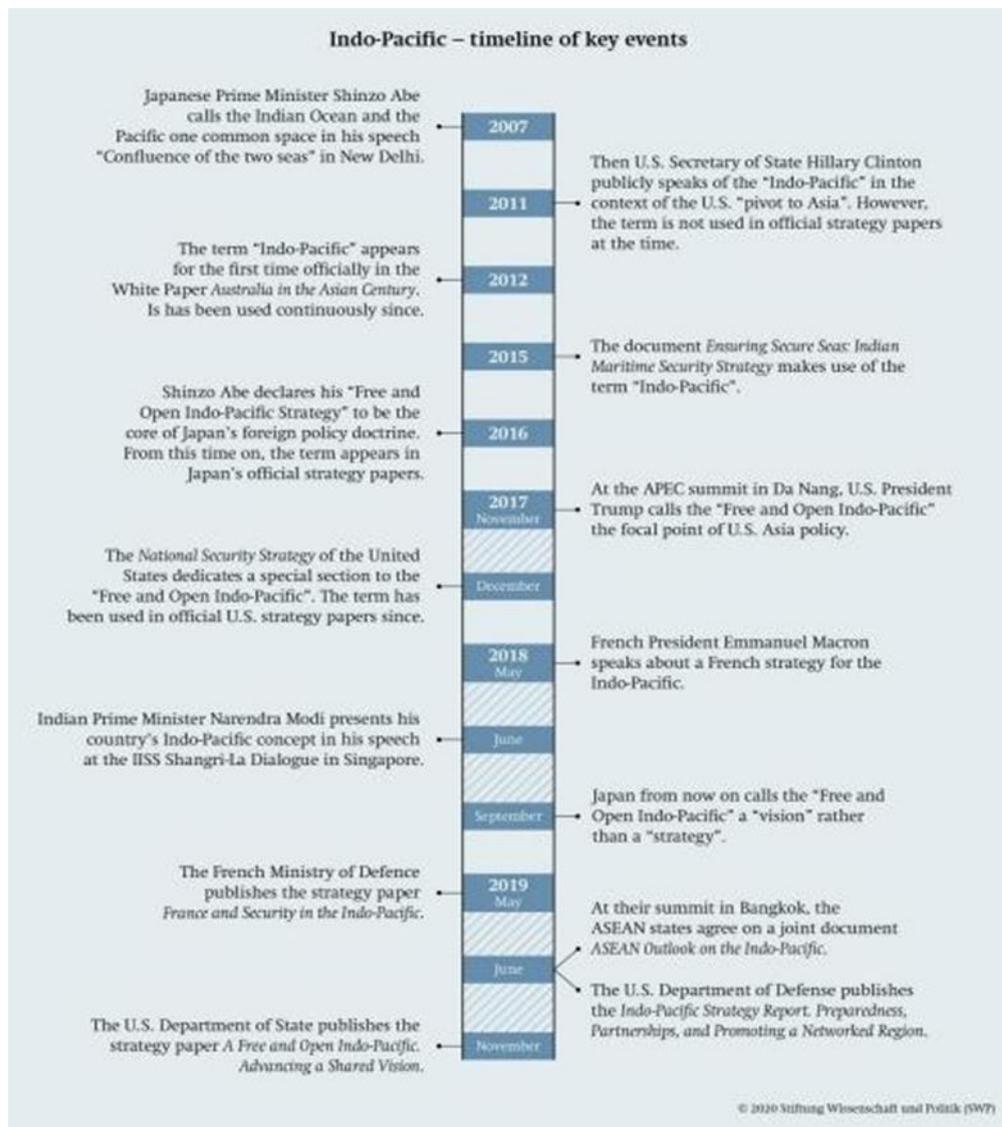
Di bulan yang sama, United States Agency for International Development (USAID) mengeluarkan *USAID's Strategic Approach to Advancing America's Vision for a Free and Open Indo-Pacific*. Pada tanggal 4 November 2019, Department of State AS mengeluarkan dokumen "A Free and Open Indo-Pacific. Advancing a Shared Vision". Dokumen-dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai pilar dan bentuk kerja sama FOIP.

Berdasarkan dokumen USAID FOIP (AS) dibangun dengan tiga pilar. Pertama, pilar *governance*. Dalam hal ini, Indo-Pasifik yang bebas (free) berarti mencakup dua hal: (1) negara-negara yang bebas dari pemaksaan; dan (2) manusia yang bebas. Kedua, pilar *ekonomi*. Indo-Pasifik yang terbuka (open) berarti: (1). Perdagangan dan investasi yang terbuka, yang ditandai dengan perdagangan yang bebas, fair, dan resiprokal, serta lingkungan investasi yang berbasis pasar dan terbuka; dan (2). konektivitas yang terbuka - baik alur laut, jalur udara, dan cyberspace - untuk mendorong integrasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Ketiga, pilar *keamanan*. Indo-Pasifik yang aman dipahami sebagai adanya jejaring mitra keamanan yang fleksibel dan resilient guna memastikan stabilitas kawasan, keamanan maritim, freedom of navigation and overflight serta menanggulangi ancaman bersama seperti kejahatan transnasional dan terorisme. Dalam perspektif AS, tampak bahwa konsep Indo-Pasifik tidak saja didasarkan pada prinsip kesamaan kepentingan (interest) namun juga kesamaan nilai (value).

Oleh karena itu, implementasi FOIP AS tidak saja digerakkan oleh agen-agen utama pemerintah seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan,

namun juga melibatkan institusi bantuan internasional AS. Dalam hal ini, USAID berperan 16 mendukung upaya bilateral dan regional FOIP di tiga fokus sasaran: penguatan sistem demokratis, pertumbuhan ekonomi, dan manajemen sumber daya alam.

Gambar 8. Timeline Konsep Indo-Pasific



Sumber: Stiftung Wissenschaft und Politik (2020)

Pada konsepsi Amerika Serikat ia didukung sekutunya dalam merespons kekuatan China di kawasan Indo-Pasifik. Sekutunya (The Quadriateral Security Dialogue) dari kekuatan yang berpikiran sama untuk menjaga ambisi China tetap terkendali. Ini pada dasarnya adalah "koalisi pencegahan" terhadap China. Dengan

Singapura ikut campur, “SQUAD” telah menjadi kelompok geopolitik potensial lainnya. Dalam banyak hal, itu menjadi hampir tidak mungkin untuk memisahkan Indo Pasifik dari QUAD, atau SQUAD, dan perintah "Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka" dari pemerintahan Trump (FOIP). Apa yang membawa⁷⁰ negara-negara “sepikiran” (atau SQUAD) bersama-sama adalah kemampuan mereka (yaitu, kekuatan angkatan laut yang kuat) serta kepentingan dan norma bersama, yaitu menegakkan tatanan internasional berbasis aturan yang menjamin akses bebas ke Jalur Komunikasi Laut melalui pertempuran ancaman dari aktor non-negara serta membatasi kecenderungan revisionis dari meningkatnya kekuatan angkatan laut di seluruh wilayah Indo-Pasifik, khususnya Cina.

- ***Stable and Prosperous Indo-Pacific- Australia***

Istilah Indo-Pasifik yang digunakan Australia pertama kali merujuk pada *Defence White Paper* yang dikeluarkan pada bulan Mei 2013. Dalam dokumen tersebut, Indo-Pasifik mencakup wilayah yang terbentang dari India hingga ke Asia Tenggara dan Asia Timur Laut, termasuk alur laut komunikasi (sea lines of communication).⁷¹ Cakupan wilayah ini kemudian mengalami penyesuaian pada 2017 *Foreign Policy White Paper*. Dalam dokumen tersebut, konsep geografis Indo-Pasifik mencakup wilayah yang terbentang dari bagian timur Samudera Hindia hingga ke Samudera Pasifik yang dihubungkan oleh Asia Tenggara. Menurut konseptualisasi ini, Indo-Pasifik meliputi juga India, Asia Utara, dan Amerika Serikat.⁷²

Dari sudut pandang kepentingan nasional Australia, Skema *Stable and Prosperous Indo-Pacific* setidaknya meliputi tiga dimensi. Pertama, dimensi *keamanan*, yaitu membangun militer (Australian Defence Force) yang berkemampuan, lincah, dan efektif. Kedua, dimensi *ekonomi*, yang mencakup diplomasi aktif dan menggunakan kerja sama pembangunan (development cooperation) untuk mendorong reformasi ekonomi dan stabilitas sosial. Ketiga,

⁷⁰ theamericaninterest.com. (2013). *The Indo-Pacific: What's in a Name?*. Diakses pada 10 Oktober 2013.

⁷¹ Departement of Defence. (2013). *Defence White Paper. Australia Government Depatement of Defence*. Hlm 4.

⁷² Australian Government. (2017). *Foreign Policy White Paper*. Australia Government

dimensi *hukum*, termasuk di dalamnya penguatan hukum dan peradilan, pengamanan batas wilayah, dan kemampuan intelijen.⁷³

Pendekatan Australia terhadap pembangunan infrastruktur kawasan ditopang oleh beberapa inisiatif, di antaranya: (1) alokasi untuk Indo-Pasifik, melalui peningkatan fleksibilitas *Export Finance and Insurance Cooperation* (EFIC) dan *Trilateral Partnership for Infrastructure Investment in the Indo-Pacific* antara Australia-Jepang-Amerika Serikat; (2) alokasi untuk Asia Selatan, melalui *South Asia Regional Infrastructure Connectivity* (SARIC) program dengan alokasi *Australian Dollar* (AUD) 25 juta; dan (3). alokasi untuk Asia Tenggara melalui *Southeast Asia Infrastructure and Economic Governance Facility* (SEAEGIF) dengan alokasi AUD 121 juta.

Gambar 9. Beberapa Inisiatif Australia di kawasan Indo-Pasifik



Sumber: The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) (2019)

- ***Belt and Road Initiative (BRI)- China***

Belt and Road Initiative (BRI) diluncurkan pertama kali oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013. Konsep ini terdiri dari *Silk Road Economic Belt* (atau sering disebut sebagai elemen "the Belt") dan *21st Century Maritime Silk Road*

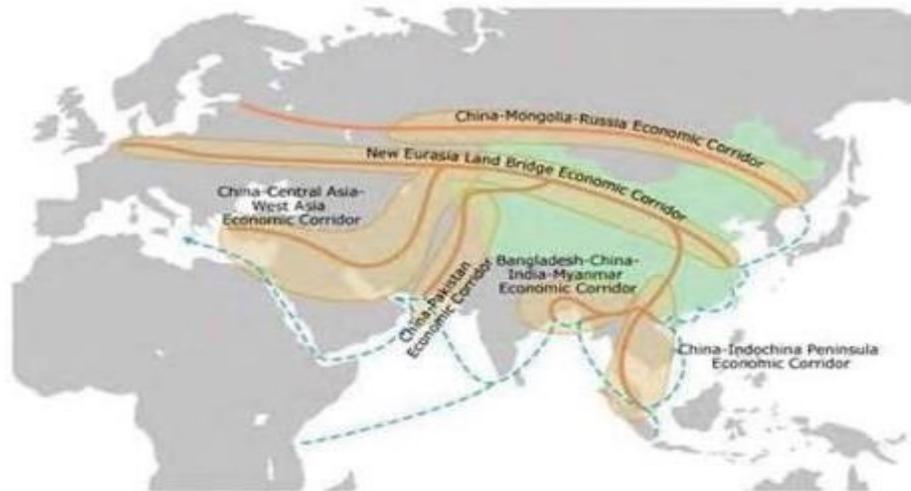
⁷³ Ibid

(atau "the Road"). Konsep Silk Road Economic Belt meliputi lima tahap, yaitu: (1). Memperkuat komunikasi antar-kebijakan; (2). Membangun konektivitas jalan melalui pembukaan jalur transportasi dari Pasifik ke Laut Baltik dan secara bertahap membangun jaringan transportasi yang menghubungkan Asia Timur, Asia Barat, dan Asia Selatan; (3). Mendorong 28 fasilitas perdagangan; (4). Memperkuat sirkulasi moneter; dan (5). Memperkuat pertukaran antar-warga Negara.⁷⁴ Sementara itu, *konsep 21st Century Maritime Silk Road* pertama kali dikemukakan saat pidato Presiden Xi Jinping di depan DPR Indonesia pada bulan Oktober 2013.

Pada bulan Maret 2015, Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional (National Development and Reform Commission/ NDRC), Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan China mengeluarkan "*Action Plan on the Belt and Road Initiative* yang menghubungkan China-Central Asia-Russia-Europe (the Baltic), China-Persian Gulf-Mediterranean Sea, China-Southeast Asia-South Asia-Indian Ocean dan China-South China Sea-Indian Ocean & South Pacific. Untuk menunjang agenda konektivitas tersebut di atas, Pemerintah China telah menetapkan enam koridor kerja sama ekonomi internasional, yaitu: (a) New Eurasia Land Bridge; (b) China-Mongolia-Russia; (c) China-Central Asia-West Asia; (d) China-Indochina Peninsula; (e) China-Pakistan; dan (f) Bangladesh-China India-Myanmar.

Gambar 10. Enam Koridor BRI

⁷⁴ fmprc.gov.vom. (2013). *President Xi Jinping Delivers Important Speech and Proposes to Build a Silk Road Economic Belt with Central Asian Countries*. Diakses pada 07 September 2013.



Sumber: ESCAP dikutip dalam CSIS (2019)

Sebagai platform kerja sama internasional dalam kerangka BRI, pemerintah China menyelenggarakan The Belt and Road Forum for International Cooperation (BaRF) yang pertama di Beijing pada tahun 2017 dan yang kedua di kota yang sama pada tahun 2019. Forum pertama dihadiri oleh sekitar 29 kepala negara/kepala pemerintahan dan perwakilan dari sekitar 130 negara dan 70 organisasi internasional.⁷⁵ Pada Forum kedua, hadir sekitar 36 kepala negara/kepala pemerintahan.

- ***Security and Growth for All Region- SAGAR***

Konsep Security and Growth for All Region (SAGAR) pertama kali dicetuskan oleh Perdana Menteri Narendra Modi pada kunjungannya ke Mauritius bulan Maret tahun 2015. Namun istilah Indo-Pasifik dalam konseptualisasi India dapat ditarik dari Act East Policy yang dicetuskan pada tahun 2014 – perkembangan dari kebijakan ‘Look East’ yang diterapkan sebelumnya. Kebijakan tersebut merujuk pada wilayah yang mencakup rute yang menghubungkan Samudera Hindia bagian tenggara dengan Samudera Pasifik, Laut China Selatan dan Timur dan Samudera Pasifik bagian barat, serta wilayah-wilayah pesisirnya.

Namun pemahaman ini meluas sejak pernyataan Perdana Menteri Narendra Modi yang disampaikan pada *IISS Shangri La Dialogue* bulan Juni 2018. Dalam

⁷⁵ State Council of the People’s Republic of China. (2017). *Belt and Road Forum to Bring About Fresh Ideas*.

pidatonya, Perdana Menteri Modi menyebut bahwa kepentingan keamanan Indo-Pasifik India mencakup wilayah dari pantai barat Amerika hingga ke pesisir timur Afrika. SAGAR merupakan artikulasi visi India untuk Indo-Pasifik dan bagaimana India akan membangun engagement di Indo-Pasifik.⁷⁶ Tujuan utama dari konsep SAGAR adalah memastikan perdagangan dan investasi intra-samudra tetap berjalan, dan mengamankan keberlanjutan akses terhadap sumber daya lautan, termasuk sebagai sumber makanan, obat-obatan dan energi bersih.

Elemen di dalam SAGAR meliputi: a. Penguatan kapasitas dalam menjaga teritori dan kepentingan baik di wilayah darat maupun maritim; b. Penguatan kerja sama ekonomi dan keamanan di wilayah pesisir; c. Mendorong aksi kolektif dalam menanggulangi bencana alam dan berbagai ancaman maritim, seperti perompakan, terorisme, dan kemunculan aktor-aktor non-negara; d. Menciptakan pembangunan kawasan yang berkelanjutan melalui penguatan kolaborasi; e. Melibatkan negara-negara lain dengan tujuan membangun kepercayaan yang lebih besar dan mendorong penghormatan terhadap aturan, norma, dan penyelesaian sengketa secara damai.

Pada acara Shangri-La Dialogue tahun 2018, Perdana Menteri Narendra Modi menyebut bahwa visi India mengenai Indo-Pasifik lebih menggunakan kaca mata optimis, dalam arti harus bebas, terbuka dan inklusif yang tidak saja mencakup kerja sama dengan negara-negara yang secara geografis berada di kawasan tersebut tapi juga negara-negara lain yang berkepentingan. Dengan demikian, setidaknya terdapat dua kepentingan India melalui SAGAR ini. Pertama, kepentingan negara untuk menjaga kedaulatan (sovereignty) dan kedua, kepentingan untuk memastikan kawasan samudra Hindia tetap terbuka dan bebas sebagai prasyarat pembangunan ekonomi India yang mana hanya bisa tercapai melalui kerja sama dengan negara-negara lain.

Peningkatan konektivitas maritim merupakan salah satu elemen penting di dalam skema SAGAR karena beberapa hal. Pertama, India memiliki garis pantai sepanjang 7,500 km dan beberapa ratus pulau yang terletak di antara Lakshadweep

⁷⁶ Singh. (2016). *Accountancy.Revised Edition.India*: SBPD Publication. Hlm 163

dan Kepulauan Andaman dan Nikobar. Kedua, 90 persen perdagangan India dan hampir seluruh impor minyak India dilakukan melalui samudera Hindia. Ketiga, dari 100.000 kapal yang melintasi samudera Hindia membawa: 50 persen pengiriman kontainer dunia; 33 persen lalu lintas kargo dunia dan 66 persen kebutuhan minyak harian dunia.⁷⁷

Konektivitas dalam skema SAGAR dikembangkan baik dalam kerangka dua negara maupun multi-negara. Beberapa proyek antara dua negara di antaranya di jalankan India dengan Iran (misalnya investasi senilai USD 500 juta di Chabahar Port, kehadiran di pelabuhan Bandar Abbas, menghubungkan Chabahar dengan Zaranj-Delaram di Afghanistan yang dibangun India), Bangladesh (Payra Port; MoU penggunaan pelabuhan Chittagong dan Mongla sebagai pintu masuk produk-produk dari India), Sri Lanka (Kankesanthurai Port dan Trincomalee oil tank farm); Oman (Duqm Port complex dan fertilizer plant); dan negara-negara Afrika dalam kerangka Asia Africa Growth Corridor (AAGC).

Sementara itu, beberapa proyek konektivitas multi-negara meliputi kerja sama trilateral highway dan perpanjangannya, Kaladan multi-modal transit transport corridor, Bangladesh-China-India-Myanmar (BCIM) *economic corridor*, *Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India* (TAPI), gas pipeline *International North-South Transport Corridor* (INSTC), *INSTC express corridor*, *India-Iran Afghanistan transport corridor* dan *Bangladesh-Bhutan-India-Nepal* (BBIN).

- **EU-Asia Connectivity**

Sebagaimana dalam BRI (RRT), GMF (Indonesia), dan Greater Eurasian Connectivity (Rusia), Indo-Pasifik juga tidak disebut secara eksplisit di dalam cakupan geografis EU-Asia Connectivity. Meski demikian, skema EU-Asia Connectivity penting di dalam pembahasan Indo-Pasifik karena memiliki persinggungan dengan berbagai konsep atau skema Indo-Pasifik yang dikembangkan oleh berbagai negara. Secara geografis, EU-Asia Connectivity melibatkan negara-negara EU dan Asia secara umum, dan secara spesifik

⁷⁷ Durairaj Kumarasamy. (2019). *SAGAR: India's Experience in Infrastructure Development in the Indo-Pacific Region* International Seminar on Indo-Pacific Connectivity Outlook. Padang State University.

negaranegara di kawasan Indo-Pasifik seperti RRT, Jepang, Korea Selatan, India, AS, Australia, termasuk juga ASEAN.⁷⁸

Dibanding skema lainnya, skema ini sangat menekankan dimensi ekonomi, terutama aspek pembangunan konektivitas dan sustainability. Berdasarkan dokumen Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank: Connecting Europe and Asia – Building Blocks for an EU Strategy tahun 2018, EU-Asia Connectivity merupakan upaya engagement Eropa dengan Asia melalui tiga hal utama:

1. Berkontribusi terhadap keterhubungan dan jaringan yang efisien antara Eropa dan Asia melalui koridor transportasi, jaringan digital, dan kerja sama energi prioritas sebagai pelayanan terhadap masyarakat di masing-masing negara.
2. Membangun kemitraan untuk konektivitas berdasarkan aturan dan standar yang disepakati bersama yang memungkinkan terwujudnya tata kelola yang lebih baik dalam hal aliran barang, manusia, modal, dan layanan.
3. Berkontribusi dalam upaya mengisi gap investasi yang besar melalui peningkatan mobilisasi sumber daya, penguatan kembali pengaruh sumber daya keuangan EU, dan penguatan kemitraan internasional.⁷⁹

4.3 Rivalitas China-Amerika Serikat

Persaingan China- Amerika Serikat adalah sebuah rivalitas yang kompleks dan mencakup banyak domain yang saling terkait. Adapun beberapa tantangan Amerika Serikat pada china terkait dalam lima bidang utama, yakni kontrol atas wilayah Indo-Pasifik, perdagangan dan ekonomi, pencarian China untuk standar teknis alternatif, pengejaran dominasi teknologi dan kemajuan militer China. Sebuah studi terpisah mengidentifikasi daftar faktor yang mendorong persaingan China-Amerika Serikat, termasuk pengejaran kekuasaan dan keamanan; status, kedudukan, dan prestise; kemakmuran dan kekuasaan ekonomi; kontrol dan akses

⁷⁸ European Commission. (2018). *Joint Communication Connecting Europe and Asia Building Blocks for an eu strategy*

⁷⁹ *Ibid*

ke sumber daya; klaim teritorial atau kedaulatan; nilai dan ideologi; dan kemampuan membentuk tatanan internasional melalui aturan, norma dan institusi.

Setidaknya ada tiga cara umum untuk membagi persaingan China-Amerika Serikat secara keseluruhan

1. Global versus regional: Persaingan yang dipengaruhi oleh faktor tambahan, seperti peran lembaga global dan perjanjian internasional. Biasanya persaingan ideologi dan nilai yang berbeda, serta berbagai cara—termasuk melalui cara diplomatik, ekonomi atau militer—untuk mengejar kepemimpinan atau kekuasaan internasional atau regional yang lebih besar.
2. Fungsional versus geografis: Persaingan berdasarkan geografi dan lintas sektor dalam hal rangkaian masalah atau jalur fungsional. Persaingan fungsional dapat berupa persaingan teknis-militer pada sistem persenjataan dan persaingan dalam domain tertentu, seperti luar angkasa, siber dan nuklir.
3. Masa damai versus kemungkinan: Intensitas persaingan China-Amerika Serikat juga dapat bervariasi tergantung pada keadaan hubungan bilateral yang krisis atau konflik.⁸⁰

Dalam persaingan China-Amerika, kedua negara masing-masing menggunakan bentuk pengaruh yang tersedia dalam membentuk perilaku dan pilihan mitra agar selaras dengan kepentingan mereka masing-masing. Hal ini akan membahas mitra sebagai penyelarasan mitra, atau dukungan mitra berkelanjutan pada masalah-masalah utama melalui posisi, tindakan, atau aktivitas.

Tabel 4. Comparing U.S. Peacetime Competition for Influence with Military Conflict China

⁸⁰ Unclassified. (2019). *Competition Continuum*. Joint Doctrine Note. Hlm. 1-19

	Peacetime Competition for Influence	Military Conflict
U.S. Goal	Encourage partner alignment (continuous partner support for the United States) on major issues, including convincing partners to not side with China in ways that may undercut U.S. interests or positions.	Defeat China politically and militarily.
Primary U.S. Target	Partner	China
U.S. Means	Extent of shared partner interests with the United States (compared with China) and relative U.S. capability incentivize or coerce the partner (compared with China).	Balance of interests and balance of capabilities between the United States and China.
U.S. Desired End State	No single, clear, and final victory. Instead, the United States continuously seeks partner support ("wins") on major decisions.	Clear U.S. political and military victory over China.

Sumber: RAND Corporation (2020)

Bentuk perbedaan pengaruh kedua negara dapat terlihat dari berbedanya visi China dan Amerika Serikat di kawasan. Visi China untuk Indo-Pasifik, didasarkan pada model China-sentris yang melibatkan perluasan kekuatan China, mendorong integrasi dan ketergantungan regional yang lebih besar pada China dan khususnya membawa Asia Tenggara di bawah kepemimpinan China. Tujuannya untuk pertimbangan domestik, termasuk kekhawatiran atas kedaulatan dan integritas teritorial, pembangunan ekonomi, dan pemeliharaan lingkungan eksternal yang stabil dan aman.

Sedangkan visi Amerika Serikat, yang baru-baru ini diartikulasikan oleh pemerintahan Trump dan dibangun di atas poros Amerika Serikat didasarkan pada pemeliharaan kebebasan, keterbukaan, keamanan, dan stabilitas regional negara di kawasan. Ini termasuk memastikan kebebasan akses ke domain bersama, mencegah China mendominasi dan membangun lingkup pengaruh eksklusif, dan melindungi dan menjaga kepentingan AS, sekutu dan mitra.

4.3.1 Kepentingan China

Saat ini, China adalah negara pengeksport terbesar di dunia. China adalah konsumen barang-barang kebutuhan pokok terbesar dan semakin menjadi sumber utama investasi, terutama dalam infrastruktur strategis di Asia dan di seluruh dunia serta negara-negara berkembang. Kekuatan China tidak lagi pada ranah ekonomi saja namun sudah kepada ranah militer. Dalam pandangan Xi, peningkatan pesat negaranya menjadi kaya dan berpengaruh terjadi setelah puluhan tahun

ketidakstabilan domestik dan ketidakamanan ekonomi berdiri sebagai validasi yang tak terbantahkan atas potensi China dan takdir sejarah negaranya menjadi pusat dunia. Dengan demikian, Belt and Road Initiative (BRI) pada intinya merupakan cerminan dari kemunculan China sebagai kekuatan global sekaligus sebagai instrumen untuk mewujudkan Sino-sentris.

Berikut beberapa tujuan BRI terbagi dalam dua tema utama:

1. Penyeimbangan Kembali Ekonomi Internal.

BRI mengakomodir kelompok kepentingan domestik China, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan champion nasional serta policy bank; memerangi kontraksi ekonomi antar nasional dan ketidaksetaraan geografis, dan kebutuhan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cepat ketika China menghadapi tantangan struktural yang dapat mengarah pada perangkap pendapatan menengah.

- Memfasilitasi rencana jangka panjang China untuk mengembangkandaaerah terkurung daratan dan daerah tertinggal.
- Mengalihdayakan kelebihan produksi internal dan kelebihan kapasitas infrastruktur di tengah perlambatan permintaan global untuk ekspornya.
- Membantu dan memajukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bermasalah yang mempekerjakan puluhan juta tenaga kerja, melalui penyediaan proyek-proyek yang menggiurkan di luar negeri.

2. Peningkatan Pengaruh Global China.

Peningkatan pengaruh global China di tujukan untuk, Pertama, Dapatkan pijakan di negara-negara yang berlokasi strategis dengan China mengembangkan serta merundingkan akses basis di seluruh negara sahabat di Samudera Hindia, membentang dari Seychelles, Chittagong (Bangladesh) di timur hingga Hambantota (Sri Lanka) dan Gwadar (Pakistan) di barat. Kedua, Mengunci komoditas langka kunci pembangunan jangka panjang bersama negara-negara kaya sumber daya di Asia Tengah, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara. Peningkatan infrastruktur memungkinkan transfer mineral berharga, komoditas pangan, dan produk hidrokarbon yang lebih efisien dan lebih murah dari hulu di negara-negara yang tercakup dalam BRI sampai ke hilir pasar konsumen dan pusat industri

Ketiga, Globalisasi standar teknologi dan industri China di seluruh pasar negara berkembang dengan membangun proyek infrastruktur besar-besaran serta bermitra dengan perusahaan asing dalam produksi di seluruh dunia. Ini juga akan membantu China mendiversifikasi basis produksinya yang terkonsentrasi jauh dari Pearl River Delta (PRD), pusat manufaktur dunia. PRD, yang hanya mewakili 1% dari wilayah negara dan 5% dari populasinya, bertanggung jawab atas 10% dari total PDB, seperempat dari total ekspor, dan menampung seperlima dari total FDI Cina.⁸¹ Secara kuantitatif, China bertujuan untuk meningkatkan kandungan dalam negeri komponen inti dan bahan dari 40% pada tahun 2020 menjadi 70% pada tahun 2025.⁸²

Untuk mewujudkan Tujuan China maka China melakukan strategi dalam menguasai wilayah Indo-Pasifik sesuai kepentingan nasionalnya, seperti:

a. Komunitas Masa Depan Bersama untuk Umat Manusia

Visi China untuk kawasan Indo-Pasifik dan tatanan internasional didasarkan pada konsep “komunitas masa depan bersama bagi umat manusia” atau “komunitas senasib.” Beijing telah mengembangkan visi ini, yang pertama kali diusulkan oleh Presiden China Xi Jinping pada tahun 2013, dan menghubungkannya dengan beberapa tujuan utama kebijakan dalam dan luar negeri, termasuk mencapai "Impian China" untuk meremajakan bangsa China dan memulihkan kekuatan dan pengaruh China di negaranya. tetangga dan seterusnya. Visi ini, sebagaimana diungkapkan dalam Kebijakan China tentang Kerjasama Keamanan Asia-Pasifik (2017), menghindari diskusi tentang ketidakseimbangan kekuatan antara China dan negara-negara di Asia-Pasifik dan berupaya untuk mencegah perilaku penyeimbangan.

Di kawasan Indo-Pasifik dan Asia Tenggara, visi ini membutuhkan penghormatan regional kepada China dan kepemimpinan China melalui integrasi regional yang lebih besar dan peningkatan kerja sama dan keterlibatan internasionalnya dalam (dan peran dalam membentuk) organisasi dan inisiatif

⁸¹ economist.com. (2017). *What China can learn from the Pearl river delta*. Diakses pada 06 April 2017

⁸² pnas.org. (2015). *Energy and material flows of megacities*. Diakses pada 27 April 2015

multilateral untuk keamanan wilayahnya. Mengutip NSS 2017 dan NDS 2018, para ahli China melacak identifikasi AS terhadap China sebagai ancaman utama dan pesaing strategisnya di kawasan Indo-Pasifik. Bagi para analis China, Amerika Serikat telah menganut mentalitas “Perang Dingin” dan menggunakan sarana ekonomi dan keamanan untuk melawan China.

Buku putih pertahanan resmi China tahun 2019 menunjukkan bahwa “persaingan strategis internasional sedang meningkat,” bahwa Amerika Serikat “telah memprovokasi dan mengintensifkan persaingan di antara negara-negara besar,” dan bahwa sekarang ada “ketidakpastian yang lebih besar terhadap keamanan regional” di Indo- wilayah Pasifik. China memandang Amerika Serikat sebagai aliansi yang memperkuat, memanfaatkan Quad (Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India), dan mencari mitra baru (khususnya Vietnam dan Indonesia) untuk memeriksa pengaruh regional China yang berkembang.

Ada kekhawatiran bahwa Amerika Serikat bermaksud untuk memperumit lingkungan keamanan China dengan mempertajam ketegangan di LCS, meningkatkan sentimen anti-China di kawasan itu, dan mengganggu upaya China untuk mendorong kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara kawasan. Amerika Serikat menjadi lebih aktif di kawasan ini, termasuk terlibat dalam lebih banyak operasi kehadiran, latihan, dan kegiatan lainnya.

Kerja sama China dengan ASEAN dan upaya Kerjasama Lancang-Mekong (LMC) juga terkait dengan visi China untuk “komunitas masa depan bersama.” Karena ASEAN bekerja berdasarkan konsensus, China dapat mencari pengaruh yang lebih besar atas ASEAN dengan bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki hubungan lebih dekat dengan China atau secara ekonomi lebih bergantung pada China, terutama mereka yang tidak terlibat dalam sengketa LCS dengan China. Ini termasuk Burma, Kamboja, dan Laos.

Diprakarsai pada tahun 2016, LMC dibangun di sekitar kerja sama antara China dan lima negara tetangga Asia Tenggara daratan (Burma, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam) di sepanjang sungai utama yang mengalir dari China—bagian sungai yang mengalir melalui China adalah disebut Lancang, dan bagian yang mengalir melalui Asia Tenggara disebut Mekong. Upaya LMC merupakan

upaya yang lebih terbatas secara geografis dan terpisah dari BRI, namun mencakup banyak elemen yang mirip dengan BRI.

b. Pembangunan Ekonomi

Kepentingan inti kedua untuk mempertahankan pembangunan ekonomi dan sosial China juga berlaku di Asia Tenggara. Mirip dengan Amerika Serikat, ini melibatkan mempromosikan perdagangan dan investasi. China berdagang dan berinvestasi paling banyak dengan (secara berurutan) Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Cendekiawan Tiongkok juga mengidentifikasi negara-negara ini sebagai negara dengan potensi ekonomi paling besar dan negara-negara yang ingin bermitra dengan Tiongkok mengingat kepentingan ekonomi mereka (dan kepentingan geopolitik terkait).

Perdagangan maritim sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi China, khususnya impor energi. Berbeda dengan kekhawatiran AS atas tiga chokepoint maritim di Asia Tenggara, China secara khusus berfokus pada Selat Malaka dan memandang ketergantungannya pada Selat Malaka untuk transit barang-barang maritim dan pasokan energinya sebagai kerentanan utama. China dapat memprioritaskan negara dekat Selat Malaka—Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dan Burma untuk mengangkut energi ke China melalui darat dari Samudera Hindia. Thailand mungkin juga diprioritaskan karena kepentingan Cina dalam membangun kanal melintasi tanah genting Kra di Thailand.

Menurut penelitian dari Mckinsey, kekuatan China sebagai negara telah mencapai skala global, hal tersebut dapat dilihat dari data-data sebagai berikut:⁸³

- Pada tahun 2018, PDB China adalah yang terbesar kedua setelah Amerika Serikat jika dilihat dalam segi jumlahnya.
- China telah menjadi negara yang mempunyai perdagangan barang terbesar sejak 2013, sebesar 11,4% dari perdagangan global pada tahun 2017
- Terdapat 110 perusahaan China yang masuk dalam Global Fortune 500 companies, kurang lebih sebanding dengan Amerika Serikat.

⁸³ mckinsey.com. (2019). *China and the world: Inside the dynamics of a changing relationship*. Diakses pada 01 Juli 2019

- China mempunyai sistem finansial yang sangat besar (sistem bank terbesar, pasar saham terbesar kedua dan pasar bond terbesar ketiga).

c. Lingkungan Eksternal yang Aman dan Stabil

Tujuan utama terakhir bagi China adalah memelihara lingkungan eksternal yang aman dan stabil untuk menopang pertumbuhan ekonomi RRT dan modernisasi militer. Paling tidak, ini melibatkan mengatasi ketakutan bahwa Amerika Serikat mungkin berusaha membatasi perkembangan China dengan mengorganisir aliansi atau koalisi anti-China untuk mengepung atau menahan China. Terlepas dari penolakan publik, China juga bisa mencari hegemoni regional, ekspansi, atau untuk membangun lingkup pengaruh di lingkungannya.

Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, China perlu memperdalam dan membangun kemitraan, memperluas akses militernya, dan melemahkan aliansi dan kemitraan AS. China tidak memiliki aliansi militer di Asia Tenggara, tetapi mencari kemitraan yang kuat. Tidak ada hierarki yang pasti dan jelas tentang kemitraan strategis China, tetapi China mengelompokkan negara ke dalam kategori luas yang membantu menunjukkan pentingnya mereka. China menyebut beberapa mitra strategis terpentingnya sebagai Mitra Koperasi Strategis Komprehensif. Di Asia Tenggara, ada lima negara seperti itu: Burma, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam. China kemungkinan akan berusaha untuk memperdalam kemitraannya dengan lima negara ini.

Tabel 5. PRC Objectives and Corresponding Priority Countries (2018)

	Thailand	Burma	Malaysia	Vietnam	Indonesia	Cambodia	Singapore	Laos	Philippines	Brunei	
Community of shared future											
Belt and Road Initiative											
Maritime Silk Road*	✓	✓	✓		✓	✓					
Silk Road Economic Belt/ Economic Corridor*	✓	✓	✓				✓	✓			
Digital Silk Road*	✓	✓	✓			✓			✓		
China-ASEAN cooperation	✓	✓		✓		✓		✓			
Lancang-Mekong cooperation	✓	✓		✓		✓		✓			
Sovereignty and territorial integrity											
Safeguard border security and stability*		✓		✓				✓			
Defend SCS claims*			✓	✓	✓				✓	✓	
Economic development											
Trade and investment	✓		✓	✓	✓		✓				
Flow of maritime trade and energy*	✓	✓	✓		✓		✓				
Secure and stable external environment*											
Deepen key PRC partnerships	✓	✓		✓		✓		✓			
Build other PRC partnerships			✓		✓		✓		✓		
Expand access	✓	✓				✓					
Weaken U.S. alliances	✓								✓		
Weaken U.S. partnerships			✓	✓	✓		✓				
Overall total	10	9	8	7	6	6	5	5	4	1	
Defense total*	7	7	7	4	5	4	4	3	4	0	
Overall priority	High			Medium					Low		

Sumber: RAND Corporation (2020)

d. Kedaulatan dan Integritas Wilayah

Visi China juga dituangkan untuk mendapatkan kedaulatan dan integrasi wilayah di kawasan Indo-Pasifik. Misalnya dengan kepentingan China dalam melindungi kedaulatan dan integritas teritorial, termasuk melawan ancaman separatistis. Buku putih pertahanan 2019 mengidentifikasi penguatan keamanan di sepanjang perbatasan China dengan Burma dan menjaga stabilitas dan keamanan umum di sepanjang wilayah perbatasan sebagai tujuan penting China. Artinya, China dapat memprioritaskan negara-negara yang berbatasan dengannya melalui darat: Burma, Vietnam, dan Laos. Termasuk akan berlaku untuk negara-negara yang terlibat dalam sengketa LCS dengan China (Brunei, Malaysia, Vietnam, Filipina) dan, pada tingkat lebih rendah, Indonesia di dekat Pulau Natuna.

Diluncurkan oleh Xi pada tahun 2013, BRI memiliki tiga komponen utama: Jalur Sutra Maritim, Sabuk Ekonomi dan Koridor Ekonomi Jalur Sutra berbasis darat, dan Jalur Sutra Digital. Untuk Jalur Sutra Maritim, Cina memiliki proyek pelabuhan besar yang sedang berlangsung di Burma, Kamboja, dan Malaysia. Cina juga tertarik dengan proyek pelabuhan di Thailand dan Indonesia. Untuk komponen darat, upaya utama RRT meliputi (1) kereta api berkecepatan tinggi yang menghubungkan Laos, Thailand, Malaysia, dan Singapura dan (2) Koridor Ekonomi China-Myanmar, yang melibatkan infrastruktur (jalan dan rel kereta api) dan kebijakan ekonomi preferensial. (seperti kawasan industri dan keringanan pajak). Untuk Jalur Sutra Digital, Cina telah memasang kabel serat optik, sistem pengawasan, dan peralatan telekomunikasi di luar negeri. Cina menghabiskan uang paling banyak untuk kegiatan ini di negara-negara berikut (berurutan): Malaysia, Filipina, Kamboja, Thailand, dan Burma.

Pertumbuhan ketegasan China di laut dekat, bagaimanapun, juga dipengaruhi oleh tindakan negara-negara penuntut lainnya. Tahun 2010 dan 2011 melihat China yang bahkan lebih tegas, yang mengguncang tetangga yang lebih kecil—mendorong banyak dari mereka ke pelukan Amerika.⁸⁴ Menanggapi keputusan Vietnam dan Malaysia untuk mengajukan klaim landas kontinen mereka kepada Komisi PBB tentang Batas Landas Kontinen (CLCS).

4.3.2 KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT

Selama masa jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri Amerika paling terkenal, Hillary Clinton sering berbicara tentang Washington sebagai jangkar perdamaian dan stabilitas di “Abad Pasifik”. Bersama Asisten Sekretaris untuk Asia Timur Kurt Campbell, teater Indo-Pasifik yang lebih luas sebagai fokus strategis utama dari Amerika. Saat menjangkau negara-negara Indo-Cina, penerus Hillary, John Kerry, menggambarkan Burma, yang saat itu merupakan negara liberal, sebagai bagian dari “koridor ekonomi Indo-Pasifik” yang penting.

Bahkan, Komando Pasifik Angkatan Laut AS, yang kemudian berganti nama menjadi Komando Indo-Pasifik, yang memainkan peran sentral dalam

⁸⁴ Edward N. Luttwack. (2012). *The Rise of China vs. the Logic of Strategy*. Harvard University Press.

mengoperasionalkan konsep tersebut dan, kemudian, memasukkannya ke dalam leksikon strategis Washington. Mantan komandan Komando Pasifik AS, Laksamana Samuel Locklear, membahas “Indo-Asia-Pasifik,” sementara penggantinya, Harry Harris, terus-menerus menyebutkan semakin pentingnya ruang geo-strategis yang luas namun koheren secara internal dari Alaska hingga Zanzibar.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat memiliki beberapa kepentingan di kawasan Indo-Pasifik. Berbagai kepentingan Amerika Serikat juga lebih diafiliasikan pada respons Amerika dalam melihat domiasi kekuatan China di kawasan Indo-Pasifik. Untuk merespon sikap China, maka atensi kepentingan Amerika Serikat seperti:

a. Menciptakan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka

Visi AS untuk tatanan internasional yang bebas dan terbuka dan Indo-Pasifik mengandung sejumlah tujuan bawahan. Ini termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan semua bangsa; penyelesaian sengketa daerah secara damai; perdagangan bebas, adil, dan timbal balik; dan kepatuhan terhadap aturan dan norma internasional.⁸⁵ Visi AS untuk Indo-Pasifik juga mencakup memastikan bahwa semua negara memiliki akses bebas ke domain bersama di ruang angkasa, dunia maya, udara, dan maritim.⁸⁶ Amerika Serikat mengakui bahwa aktivitas dan perilaku China menantang banyak elemen visi AS dan, untuk melindungi visi AS di kawasan, telah memprioritaskan persaingan strategis jangka panjang AS-China.⁸⁷

Misalnya pada keasertifan China dalam mengklaim wilayah Laut China Selatan. Fokus Amerika Serikat adalah mendukung penyelesaian damai sengketa maritim di LCS dan mempertahankan akses dan kebebasan navigasi melalui perairannya. Klaim sembilan garis putus-putus China yang luas di LCS dan militerisasi lanjutan dari fitur-fitur yang disengketakan telah membuat China berselisih dengan tetangganya, menantang kedaulatan negara lain, dan merusak

⁸⁵ U.S. Department of Defense. (2019). *Indo-Pacific Strategy Report: Preparedness, Partnership, and Promoting a Networked Region.*. Washington. Hlm. 4

⁸⁶ The White House. (2017). *National Security Strategy of the United States of America.* Hlm. 41.

⁸⁷ *Ibid.* Hlm 7-10

stabilitas regional.⁸⁸ Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan itu khawatir bahwa kehadiran dan pengerahan militer China yang meningkat dapat memberi China pilihan untuk mengendalikan atau memeriksa arus perdagangan.

Untuk mengatasi kekhawatiran tentang aktivitas China di LCS, Amerika Serikat dapat memprioritaskan tiga negara dengan sengketa maritim paling luas dengan China: Malaysia, Filipina, dan Vietnam, Indonesia dan Singapura. ke Indonesia menolak klaim China di dekat Kepulauan Natuna dan karena Singapura adalah pendukung kuat untuk mempertahankan akses ke LCS dan kebebasan navigasi.⁸⁹ Dari lima negara tersebut, tiga mitra paling aktif untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat adalah Filipina, Singapura, dan Vietnam.

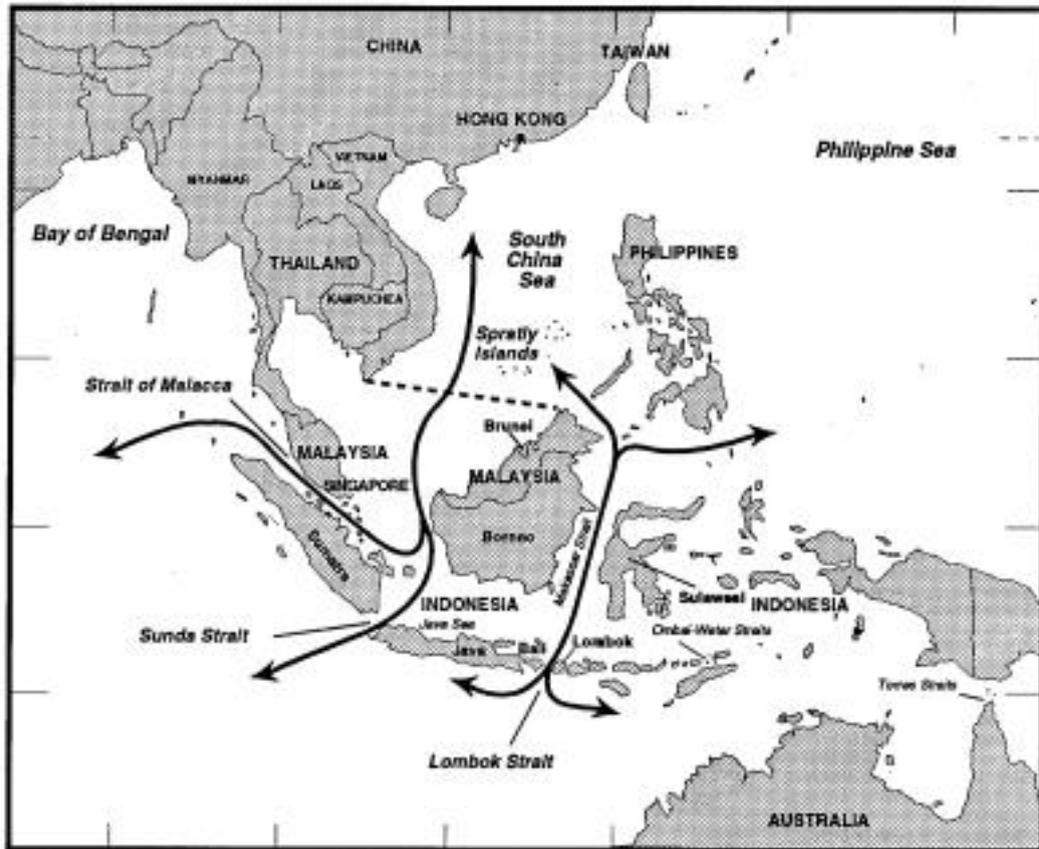
Dua dari tujuan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka adalah ekonomi: Amerika Serikat mencari hubungan ekonomi yang bebas, adil, dan timbal balik serta untuk memperluas peluang perdagangan dan investasi AS.⁹⁰

Gambar 11. Strategic Chokepoints in Southeast Asia

⁸⁸ *Lop.Cit.* Hlm. 8

⁸⁹ reuters.com. (2017). *Asserting sovereignty, Indonesia renames part of South China Sea*. Diakses pada 14 Juli 2017

⁹⁰ The White House. (2017). *National Security Strategy of the United States of America*. Hlm. 19–20.



Sumber: John H. Noer dan David Gregory (1996),

Asia Tenggara memiliki tiga chokepoint maritim utama yakni Selat Malaka, Lombok, dan Sunda yang melaluinya sebagian besar transit perdagangan AS dan regional. Tujuan umum AS untuk kawasan ini adalah untuk memastikan bahwa chokepoints ini tetap bebas dan terbuka. Untuk itu, Amerika Serikat dapat memprioritaskan kerja sama dengan negara-negara yang berbatasan dengan chokepoints maritim: Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura.⁹¹ Begitupun dengan mengingat lokasinya di sebelah perdagangan maritim yang melewati antara Kepulauan Spratly dan pantai timur Vietnam. Di antara lima negara tersebut, tiga yang paling penting adalah Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Internet yang bebas dan terbuka, yang mendukung pertukaran informasi dan layanan global, juga menjadi prioritas dan terancam. Beberapa negara ASEAN telah membatasi arus bebas informasi di internet, membatasi akses ke situs web dan

⁹¹ John H. Noer and David Gregory. (1996). *Chokepoints: Maritime Economic Concerns in Southeast Asia*. Washington, D.C. Hlm. 3.

media sosial. China telah berkontribusi terhadap tren negatif ini dengan menerapkan pembatasan keamanan siber yang dapat ditiru oleh negara lain, memberikan pelatihan kepada pejabat asing, dan mengeksport teknologi pengawasan.⁹² Untuk mengatasi hal ini, Amerika Serikat dapat memprioritaskan negara-negara pendukung yang memiliki internet lebih bebas dan terbuka. Negara-negara teratas Freedom House untuk kebebasan internet di Asia Tenggara (secara berurutan) adalah Filipina, Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Kamboja.⁹³ Singapura adalah pemimpin dalam keamanan siber di kawasan ini dan mitra siber utama bagi Amerika Serikat.⁹⁴

Seiring dengan mempertahankan domain umum yang bebas dan terbuka, visi AS melibatkan penguatan institusi regional.⁹⁵ Ini mengacu pada mendukung sentralitas ASEAN, memperdalam hubungan AS dengan ASEAN, dan bekerja dengan ASEAN untuk mempromosikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Amerika Serikat harus memberikan dukungan tambahan untuk negara-negara yang lebih bebas secara politik, tetapi tidak menutup kemungkinan AS untuk bekerja dengan negara-negara yang kurang bebas secara politik. Berdasarkan pemeringkatan kebebasan politik Freedom House, lima besar negara paling bebas (berurutan) adalah Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Burma.⁹⁶

b. Keamanan dan Stabilitas Regional

Visi kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka juga memerlukan tujuan khusus pertahanan AS untuk mempromosikan keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara. Yang pertama adalah memastikan keseimbangan kekuatan regional yang menguntungkan yaitu, keseimbangan kekuatan militer yang menguntungkan untuk mengamankan kepentingan AS, sekutu, dan mitra di wilayah tersebut.⁹⁷ Ini termasuk mencegah China membangun dominasi atau lingkup pengaruh eksklusif.

⁹² Adrian, Shahbaz. (2018). *The Rise of Digital Authoritarianism*. Freedom House. Hlm. 6

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ International Telecommunications Union. (2018). *Global Cybersecurity Index (GCI)*. Geneva: ITU Publication. Hlm.28.

⁹⁵ U.S. Department of Defense. (2019). *Indo-Pacific Strategy Report: Preparedness, Partnership, and Promoting a Networked Region*. Washington. Hlm. 46-48

⁹⁶ Freedom House. *Freedom in the World Countries*. Freedom House. undated.

⁹⁷ U.S. Department of Defense. (2018). *National Defense Strategy of the United States of America: Sharpening the American Military's Competitive Edge*. Washington, D.C. Hlm. 1

Untuk tujuan ini, Amerika Serikat mungkin ingin bekerja dengan negara-negara yang paling mampu secara militer. Mengukur kekuatan militer itu rumit; kami mengandalkan data anggaran pertahanan, ukuran personel, dan peralatan dan menilai bahwa Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Vietnam memiliki militer yang paling mumpuni.⁴⁰ Dari lima ini, Indonesia, Singapura, dan Vietnam adalah yang paling mampu secara militer.

Tujuan pertahanan AS yang kedua adalah untuk “mempertahankan sekutu dari agresi militer dan mendukung mitra dari paksaan.”⁹⁸ Filipina dan Thailand adalah sekutu, dan IPSR mengidentifikasi Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Vietnam sebagai mitra utama.⁹⁹ Amerika Serikat dapat memprioritaskan bekerja dengan dua sekutu dan empat mitra ini. Di antara keempat mitra tersebut, Amerika Serikat memiliki hubungan paling dekat dengan Singapura dan dapat memprioritaskan Indonesia dan Vietnam, mengingat keduanya mengambil sikap tegas terhadap aktivitas China di LCS.

Untuk Asia Tenggara, tiga negara yang paling penting untuk bekerja sama adalah Indonesia, Malaysia, dan Filipina, di mana Amerika Serikat berusaha untuk melawan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan ancaman VEO lainnya. Thailand dapat ditambahkan, mengingat terorisme dan pemberontakan di wilayah selatannya.¹⁰⁰ Tambahan terakhir adalah Singapura karena kemampuan kontraterorisme dan keterlibatannya dalam Koalisi Global untuk Mengalahkan ISIS yang dipimpin AS.¹⁰¹

Tujuan akhir pertahanan AS yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam dokumen strategi AS adalah untuk menolak pangkalan dan akses militer China. Pangkalan militer China di Asia Tenggara dapat meningkatkan kemampuan China untuk memproyeksikan kekuatan militer dan memperkuat kontrol China atas LCS,

⁹⁸ *Ibid.* Hlm 4

⁹⁹ U.S. Department of Defense. (2019). *Indo-Pacific Strategy Report: Preparedness, Partnership, and Promoting a Networked Region*. Washington D.C. Hlm 30-39

¹⁰⁰ thediplomat.com. (2018). *The Slow Burning Insurgency in Thailand's Deep South*. Diakses pada 06 Februari 2018

¹⁰¹ Harris Jr. (2018). *Armed Services Committee, Statement of Admiral. Pacific Command Before the House Armed Services Committee on U.S. Pacific Command Posture*. Washington, D.C.: Government Printing Office. Hlm.. 15.

memperumit upaya untuk mempertahankan domain bersama yang bebas dan terbuka.

c. Menggabungkan Tujuan dan Prioritas AS

Berdasarkan pembahasan di atas, Amerika Serikat dapat memprioritaskan negara-negara dengan melihat seluruh tujuan AS dan menghitung jumlah total tujuan yang menjadi prioritas setiap negara. Negara-negara yang relevan dengan lebih banyak tujuan AS harus lebih penting secara keseluruhan bagi Amerika Serikat.

Tabel 6. U.S. Objective and Corresponding Priority Countries (2018)

	Singapore	Indonesia	Philippines	Vietnam	Thailand	Malaysia	Burma	Cambodia	Brunei	Laos
Free and open Indo-Pacific										
Maintain SCS access and security*	✓✓		✓✓	✓✓						
Maintain economic freedom	✓				✓	✓				
Maintain trade and investment	✓				✓	✓				
Maintain free, open common domains										
Maritime chokepoints*	✓	✓				✓				
Freedom on the net*	✓		✓			✓				
Strengthen and work with ASEAN		✓		✓	✓					
Maintain political freedom	✓	✓	✓							
Regional security and stability*										
Maintain favorable balance of power	✓✓	✓✓		✓✓						
Defend allies			✓✓		✓✓					
Bolster partners	✓✓	✓✓		✓✓						
Counter VEOs		✓	✓			✓				
Deny Chinese access					✓		✓	✓		
Overall total	11	8	7	7	6	5	1	1	0	0
Defense total*	8	6	6	6	3	3	1	1	0	0
Overall priority	High			Medium			Low			

Sumber: RAND Corporation (2020)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Singapura, Indonesia, Filipina, dan Vietnam adalah yang paling penting bagi Amerika Serikat. Singapura menonjol sebagai negara yang relevan dengan sebagian besar US tujuan di kawasan. Malaysia

dan Thailand berada di antara keduanya, relevan dengan beberapa tujuan AS. Sebaliknya, Brunei dan Laos tidak kritis terhadap tujuan AS.

4.4 Respons Indonesia-Kebijakan

Saat ini minat terhadap Indo-Pasifik semakin tumbuh dan meningkat dengan negara-negara berusaha untuk terlibat dalam mengambil bagian di kawasan.. Munculnya China sebagai negara adidaya baru yang menantang Amerika Serikat telah melahirkan prognosis yang pesimis. Lalu bagaimana peran kebijakan Indonesia terhadap Indo-Pasifik berdasarkan letak strategis Indonesia di kawasan.

Indonesia memiliki posisi strategis dalam konteks geopolitik Indo-Pasifik. Indonesia berada pada titik pertemuan yang menghubungkan kedua samudera tersebut. Indonesia berada pada posisi “supra-strategis” dengan menjadi jalur pelayaran perdagangan internasional yang menghubungkan Asia Selatan, Asia Timur dan Asia Tenggara. Struktur geografis Indonesia berdampak pada masalah keamanan maritim di kawasan. Dengan demikian, arsitektur keamanan regional yang terbentuk di kawasan tidak dapat berhasil tanpa dukungan Indonesia.

Dalam tulisan Haryanto, Bakrie menyatakan bahwa “Indonesia harus mempertahankan posisi supra-strategis geografisnya, khususnya wilayah maritimnya yang strategis.¹⁰² Indonesia adalah negara terbesar keempat di dunia, dengan populasi 261 juta jiwa orang. Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, dengan 229 juta (lebih dari Arab Saudi, Iran, Irak, Afghanistan, Suriah, Lebanon, Yaman, Libya, dan seluruh Teluk Emirates digabungkan).

Daratan Indonesia mencakup lebih dari 1 juta mil persegi, terbentang di area yang panjangnya hampir 3.000 mil. Ini memiliki hampir 34.000 mil garis pantai. Indonesia memiliki perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Produk domestik bruto (PDB) adalah \$3,25 triliun bila diukur dengan paritas daya beli (PPP)—terbesar ketujuh di dunia berdasarkan PPP. PDB per kapitanya adalah \$12.400 (dalam PPP), menjadikannya negara berpenghasilan menengah. Menurut satu perkiraan ekonomi yang dihormati, itu diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia dalam tiga dekade.

¹⁰² A. Haryanto. (2015). Faktor Geografis dan Konsepsi Peran Nasional sebagai Sumber Politik Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol. 4 No. 1. Hlm.13

Indonesia adalah anggota terbesar dan paling berpengaruh dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang memiliki Sekretariat di ibu kota Jakarta. Selain aset sendiri, posisi Indonesia sebagai focal point ASEAN berpotensi meningkatkan kerjasama antara sembilan anggota lainnya: Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Burma, dan Brunei. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau (banyak di antaranya berlokasi strategis di dekat Laut Cina Selatan, Selat Malaka, dan wilayah penting lainnya), Indonesia menyajikan banyak situs potensial untuk akses udara dan laut. Selain keunggulan geografi dan demografi, Indonesia menawarkan platform nilai-nilai demokrasi bersama.

Pada tahun 2018, peringkat tersebut telah meningkat menjadi 89 dari 190: tepat di atas titik tengah. Transisi ini tidak terjadi secara kebetulan: Ini merupakan akibat langsung dari demokratisasi, dan menjadikan Indonesia mitra yang jauh lebih baik saat ini daripada di masa lalu. Terkhusus di wilayah Indo-Pasifik, Indonesia adalah jantung geografis dengan luas membentang 4.700 km (3000 mil), dari Aceh di ujung barat Asia Tenggara hingga Papua di Pasifik Selatan, negara dengan 17.000 pulau ini bertengger di persimpangan Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik dan Hindia.

Dengan intensitas luasnya wilayah Indonesia membuat harus secara serius dalam mempertahankan kedaulatan wilayah. Terlebih Indonesia memandang sikap China yang semakin agresif di seluruh kawasan hingga berpotensi menjadi ancaman yang paling masuk akal. Titik nyala paling jelas untuk konfrontasi dengan China adalah konflik Kepulauan Natuna, yang berada tepat di luar “Sembilan Garis Putus” China tetapi wilayah perairannya meluas ke dalam wilayah yang diklaim China sebagai kendali ekonomi dan politik. Teknik yang digunakan China untuk melemahkan klaim Indonesia atas zona ekonomi eksklusif mirip dengan beberapa teknik yang digunakannya di wilayah sengketa Laut Cina Selatan: Terutama, China mengirim kapal penangkap ikan untuk menjaring di perairan yang merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif.

Menanggapi ancaman China, Pada bulan Maret 2014, Indonesia mengumumkan bahwa mereka telah memulai peningkatan lapangan terbang

Kepulauan Riau di Ranai agar dapat diakses oleh pesawat Su-27 dan Su-30. Ia berencana untuk menyebarkan skuadron Sukhoi di Kepulauan Natuna. Pada tahun 2016, untuk menyoroiti masalah setelah kapal perang Indonesia menghentikan kapal China untuk penangkapan ikan secara ilegal, Presiden Joko “Jokowi” Widodo melakukan perjalanan tingkat tinggi ke kapal perang TNI-AL di lepas pantai Natuna Besar—bahkan mengadakan rapat kabinet di atas kapal.

Gerakan itu dimaksudkan untuk memberi sinyal tindakan yang lebih agresif, dan itu mencapai tujuan. Antara 2014 dan 2016, ada peningkatan yang jelas dalam serangan China; setelah kunjungan Jokowi, serangan ini dilaporkan mereda. Namun, keputusan Jokowi untuk mengganti nama hamparan laut terdekat menjadi “Laut Natuna Utara”, mendapat teguran dari Beijing.

Gambar 12. Natuna Islands



Sumber: RAND Corporation (2021)

Indonesia juga menggandeng ASEAN unntuk memperbesar pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia tentunya mengedepankan visi ASEAN-sentris yang mengakui China sebagai pilar arsitektur keamanan yang muncul. Hal ini berbeda dengan visi Modi (kemungkinan dimiliki oleh Australia dan, pada tingkat yang lebih rendah, Jepang), yang lebih menyukai keterlibatan selektif dan hati-hati dengan China, atau lebih tepatnya "kerapatan" (pembatasan dan keterlibatan simultan).

Bagi Indonesia, negara yang selalu nonblok, nilai-nilai ASEAN untuk konsultasi, konsensus, dan pertukaran ide dan barang secara damai harus terus memandu hubungan di antara negara-negara kawasan, termasuk negara-negara besar. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi baru-baru ini meluncurkan versi yang lebih inklusif dari “Indo-Pasifik,” yang mempromosikan tatanan “terbuka, transparan dan inklusif” berdasarkan “kebiasaan dialog, mempromosikan kerja sama dan persahabatan, dan menegakkan hukum internasional.”¹⁰³ Bagi Indonesia, dan sebagian besar ASEAN, China terlalu besar dan penting untuk secara realistis dikeluarkan dari tatanan regional mana pun. Singkatnya, ASEAN memandang China sebagai elemen integral dari arsitektur keamanan Indo-Pasifik.

Indonesia, satu-satunya negara yang mengidentifikasi ASEAN sebagai landasan kebijakan luar negerinya, khawatir dengan penolakan China terhadap norma-norma perdamaian regional, terutama dalam pencegahan konflik dan penyelesaian sengketa. Kembali pada Maret 2018, selama KTT Australia-ASEAN di Sydney, Indonesia menyerukan patroli bersama oleh negara-negara pesisir di Laut Cina Selatan untuk membantu mengurangi ketegangan dan secara damai menyelesaikan klaim maritim yang tumpang tindih.¹⁰⁴

Untuk merespon kekuatan China di kawasan Indo-Pasifik maka Indonesia mengeluarkan visi Indonesia yakni “Poros Maritim Dunia” untuk menjadi negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, dan kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian regional dan global, sesuai dengan kepentingan nasionalnya.. Konsep ini telah disempurnakan dan didiskusikan sampai tingkat tertentu baik dalam sumber-sumber Indonesia maupun Barat.

Ini karena Indonesia adalah negara maritim terbesar di ASEAN dan SLOC-nya (Selat Malaka, Selat Lombok, Maluku, dan Selat Wetar) telah menjadi pusat ASEAN dan dunia). Sementara itu, keamanan maritim regional sebagai aspek terpenting dari arsitektur keamanan ASEAN Plus tidak bisa lagi diserahkan

¹⁰³ Thejakartapost.com. (2018). East Asia to Hear About Indo-Pacific idea. Diakses pada 09 Mei 2018.

¹⁰⁴ thediplomat.com. (2018). *Is the South China Sea Dispute a Foregone Conclusion?*. Diakses pada 10 Mei 2018

sepenuhnya kepada Indonesia ASEAN dan badan-badan regional lainnya, karena pada akhirnya diperlukan strategi yang dapat mencakup keamanan maritim kolektif.

Indonesia secara keseluruhan lebih memilih untuk terlibat dengan Amerika Serikat dan China, memanfaatkan apa yang ditawarkan oleh dua negara kaya dan kuat ini dan tidak mau harus memilih antara Beijing dan Washington. Indonesia memanfaatkan status maritimnya sebagai negara kepulauan di kawasan. Indonesia juga hadir sebagai pembangun dan penjaga jembatan perdamaian antara dua kekuatan besar. Indonesia juga merupakan mediator konflik pihak ketiga dan pendukung multilateralisme tatanan internasional dengan mempromosikan Indo-Pasifik. Indonesia sebagai kekuatan menengah dalam fenomena Indo-Pasifik, terutama di bawah presiden Suharto, Megawati, Yudhoyono dan Jokowi.

Saat ini kebijakan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik secara implisit muncul di dalam konsep *Global Maritime Fulcrum* (GMF), atau Poros Maritim Dunia pada saat disampaikan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada forum *East Asia Summit* (EAS) ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar, bulan November 2014. Konsep ini menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan yang berada di antara dua samudera yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. GMF di bangun di atas lima pilar, yaitu: (1). Budaya maritim; (2). Sumber daya laut; (3). Infrastruktur dan konektivitas; (4). Diplomasi maritim; (5). Pertahanan maritim.¹⁰⁵ Pada Februari 2017, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Peraturan Presiden ini memberikan penjelasan lebih rinci mengenai kebijakan Indonesia terkait visi GMF.

Dalam Peraturan tersebut, GMF didefinisikan sebagai “suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional”.¹⁰⁶ Berdasarkan Kebijakan Kelautan Indonesia tersebut, kelima pilar GMF meluas menjadi tujuh yang meliputi: (1). Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

¹⁰⁵ setkab.go.id. (2016). *Indonesia Maritime Fulcrum and Tourism Cha*. Diakses pada 14 November 2016.

¹⁰⁶ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. (2017). *Kebijakan Kelautan Indonesia*.

(2). Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut; (3). Tata Kelola dan Kelembagaan Laut; (4). Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan; (5). Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut; (6). Budaya Bahari; (7). Diplomasi Maritim.

Ketujuh pilar tersebut didetailkan dalam 76 kebijakan strategis.¹⁰⁷ Sebagai guideline implementasi, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Plan of Action 2016-2019 yang berisi 425 kegiatan yang di desain untuk 330 target di bawah tanggung jawab berbagai kementerian dan Lembaga.¹⁰⁵ Sementara itu dalam Plan of Action Kebijakan Kelautan Indonesia 2016-2019, konektivitas laut dan industri maritim menjadi salah satu dari lima kluster program prioritas.¹⁰⁸ Proyek pembangunan tol laut telah dijalankan sejak November 2015 untuk memperkuat konektivitas antar-pulau dan memperkuat infrastruktur Pelabuhan.

Selain itu, proyek tol laut tersebut juga ditujukan untuk mengurangi disparitas harga-harga barang yang disebabkan oleh konektivitas yang buruk. Proyek tol laut diharapkan dapat meningkatkan perdagangan nasional.¹⁰⁹ Untuk membangun konektivitas dalam kerangka GMF, Pemerintah Indonesia telah menetapkan 24 pelabuhan strategis termasuk 5 pelabuhan hub nasional dan internasional dan 19 pelabuhan pengumpan (feeder). Pelabuhan yang menjadi hub adalah Belawan/Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar dan Bitung. Di sepanjang 2014-2018, telah dilakukan pengembangan lima pelabuhan hub nasional menuju hub internasional, sembilan belas pelabuhan pengumpan dan 162 pelabuhan perintis, utamanya untuk konektivitas antarpulau-pulau khususnya di Indonesia bagian timur. Proyek pembangunan tol laut untuk mewujudkan GMF dapat dilihat pada bagan di bawah ini.¹¹⁰

Gambar 13. Konsep Pembangunan Tol Laut untuk Mewujudkan Visi Global
Maritim Fulcrum

¹⁰⁷ Ibid

¹⁰⁸ Shafiah .F. Muhibat. (2017). Indonesia's New Ocean Policy: Analysing the External Dimension. *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India*. Vol. 13. N0. 2. Hlm 50-61

¹⁰⁹ Ibid

¹¹⁰ Indonesia.go.id. (2019). *Indonesia Poros Maritim Dunia*. Diakses pada 25 Februari 2019.



Sumber: Indonesia (2019)

Sejalan dengan perkembangan implementasi konsep tol laut terdapat setidaknya lima proyek utama pembangunan pelabuhan di Indonesia meliputi Kuala Tanjung international hub port, New Priok, Patimban deep-sea port, Bitung international hub port dan Java Integrated Industrial and Port Estate. Proses pengerjaan proyek-proyek tersebut juga melibatkan kerja sama dengan pihak lain, seperti dengan Port of Rotterdam Authority dari Belanda, pemerintah Jepang dan mitra lainnya:

Berdasarkan kebijakan Indonesia sebagai poros maritim dunia di kawasan Indo-Pasifik terdapat 3 (tiga) kelompok dari berbagai diskusi ilmiah yang memaknai konsep tersebut sebagai peran Indonesia dalam kebijakan tersebut. Kelompok pertama memaknai poros sebagai pusat atau axis dan mendefinisikan

PMD sebagai visi menjadikan Indonesia sebagai pusat kegiatan kelautan dunia.¹¹¹ Menurut kelompok pertama, PMD lebih berpeluang untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai *Global Maritime Fulcrum* (GMF). Kelompok kedua, memaknai sumbu sebagai barisan atau kesejajaran seperti sebelum sumbu Beijing Pyongyang-Jakarta. Menurut kelompok kedua, PMD cenderung diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ke dalam Poros Maritim Global. Kelompok kedua menganggap bahwa keselarasan yang dibangun antara Indonesia dan

¹¹¹ Yanyan M. Yani & Montratama. (2018). Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. Vol. 5. No. 2

kekuatan lain di kawasan regional dapat mendukung posisi strategis Indonesia dan kepentingan nasional. Kelompok ketiga, memaknai poros sebagai jalur pelayaran maritim, sehingga PMD yang dimaksud adalah visi Indonesia menguasai jalur pelayaran maritim dunia.¹¹² Kelompok ketiga ini cenderung menerjemahkan PMD ke dalam *Global Maritime Nexus* (GMN).

Dalam konsep poros maritim dunia terdapat lima pilar kebijakan Indonesia dalam fenomena Indo-Pasifik, antara lain:¹¹³

1. Budaya Maritim: sebagai negara pembangunan kembali budaya maritim melalui redefinisi identitas nasional Indonesia
2. Ekonomi Maritim: mengelola dan melestarikan sumber daya maritim bangsa.
3. Konektivitas Maritim: mengutamakan pembangunan infrastruktur maritim, pembangunan sarana dan prasarana transportasi, dan wisata bahari
4. Diplomasi maritim: mengoptimalkan jalur soft power dalam menghadapi berbagai ancaman regional dan meningkatkan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang maritime
5. Keamanan maritim: menyiapkan hard power untuk memperkuat kekuatan pertahanan maritim Indonesia dalam upaya mengamankan wilayah Indonesia.

4.5 Kerjasama Indonesia-Amerika Serikat

Salah satu langkah yang dipilih Indonesia dalam menghadapi dominasi kekuatan China di kawasan Indo-Pasifik adalah dengan bekejasama dengan negara kuat dan berpengaruh lainnya. Dengan begitu, Indonesia kemudian menjalin kerjasama bilateral bersama Amerika Serikat dalam upaya stabilitas kawasan. Terlebih Indonesia dan Amerika Serikat telah menjlain kerjasama sejak kemerdekaann Indonesia dan pada tahun 1949 hingga saat ini.

Hal ini disambut baik oleh Amerika Serikat. Ketika berusaha untuk memperluas kemitraannya di seluruh kawasan Indo-Pasifik, Indonesia adalah Negara yang menunjukkan potensi peningkatan lebih besar dari Negara-negara lainnya. Indonesia memiliki banyak nilai kesamaan terkhusus perihal Kepentingan dasar keamanan nasionalnya yang selaras dengan tujuan AS: Bagi Indonesia,

¹¹² Ibid

¹¹³ Ibid

kepentingan ini mencakup pelestarian kedaulatannya dari gangguan oleh calon kekuatan hegemonik, seperti China.

Selain itu, karena baseline yang relatif rendah untuk keterlibatan saat ini, Indonesia memiliki ruang lingkup yang lebih besar untuk memperdalam kemitraan daripada sekutu perjanjian lama, seperti Jepang, Republik Korea (ROK), Australia, Selandia Baru, dan Filipina. Untuk itu, Amerika Serikat harus memoderasi harapannya terhadap kerja sama Indonesia dalam persaingan melawan Cina yang sedang bangkit.

Dalam istilah militer dan keamanan, menggambarkan keuntungan AS yang jelas. Indonesia memandang Amerika Serikat sebagai mitra terpentingnya bidang keamanan seperti operasi kebebasan navigasi (FONOPs) di Laut Cina Selatan. Indonesia melihat Amerika Serikat jauh lebih mampu secara militer daripada China tetapi terus memiliki keraguan yang signifikan tentang apakah Amerika Serikat dapat diandalkan jika terjadi konflik. Bermasalah dengan kehadiran paramiliter China yang berkembang di perairan utaranya, Indonesia melangkah lebih jauh dengan mengganti nama perairan Kepulauan Natuna menjadi Laut Natuna Utara pada tahun 2017, menegaskan kembali hak penangkapan ikan dan eksplorasi energi eksklusifnya di tengah klaim China memiliki “daerah penangkapan ikan tradisional” di daerah.

Menurut pejabat militer Amerika Serikat dan Indonesia, TNI melihat Amerika Serikat lebih transparan dan lebih dapat diandalkan daripada China. TNI membeli peralatan China yang lebih rendah daripada peralatan AS terutama karena lebih murah, tetapi korupsi yang merajalela dalam penjualan senjata China menghasilkan efektivitas yang jauh lebih rendah daripada sistem yang lebih transparan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa Indonesia-Amerika Serikat melakukan tiga bidang kerjasama dalam menghadapi dominasi kekuatan China di kawasan Indo-Pasifik. Ketiga bidang kerjasama tersebut adalah kerjasama politik, kerjasama ekonomi dan kerjasama keamanan.

4.5.1 Kerjasama Politik

Kerjasama Politik Indonesia-Amerika Serikat berafiliasi pada Hubungan Diplomatik kedua negara di kawasan Indo-Pasifik. Pada November 2008, Presiden

Yudhoyono pertama kali mengajukan bahwa Jakarta dan Washington menandatangani kemitraan komprehensif untuk memperluas dan memperdalam hubungan antara kedua negara. Diimplementasikan pertama kali ketika Hillary Clinton melakukan kunjungan pertamanya ke Asia setelah menjadi menteri luar negeri. Keputusannya untuk memasukkan Indonesia dalam rencana perjalanan setelah Jepang secara luas ditafsirkan sebagai pertanda penekanan baru pada pengembangan hubungan bilateral. Beberapa komentator dengan cepat menangkap referensi Clinton yang lewat ke Indonesia sebagai kekuatan baru yang dengannya pemerintah akan bertujuan untuk menciptakan “dunia multi-mitra.” Tak lama setelah itu, Clinton menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama ASEAN (TAC). Meski tidak menjadi berita utama, kerja sama diplomatik pada 2009 juga mencakup kesepakatan peningkatan kapasitas diplomat Indonesia.

Kemitraan Komprehensif kedua negara secara resmi diresmikan saat kunjungan Obama ke Indonesia pada November 2010. Seorang diplomat senior Indonesia saat itu dan sekarang menjadi menteri luar negeri Indonesia yang menggambarkan kemitraan yang komprehensif sebagai upaya “membangkitkan struktur hubungan, menyepakati prioritas dan bagaimana mencapai target” sehingga “hubungan menjadi lebih dapat diprediksi dan diukur.” Pihak Indonesia juga melihatnya sebagai aset strategis, baik untuk mengembangkan peran global Indonesia maupun sebagai sesuatu yang akan berkontribusi pada keamanan kawasan. Kemitraan AS-Indonesia mengadakan pertemuan perdana Komisi Bersama di tingkat menteri luar negeri pada September 2010, bahkan sebelum resmi diluncurkan dan mengumumkan enam kelompok kerja fungsional.

Pada tahun 2013, Amerika Serikat memperbarui citra "poros" dengan pernyataan tentang "penyeimbangan kembali" yang menetapkan agenda yang mencakup penempatan 60 persen angkatan lautnya di kawasan itu pada tahun 2020 dan menjaga empat kapal dirotasi melalui Singapura serta rotasi tahunan Marinir AS melalui pangkalan Angkatan Pertahanan Australia di dekat Darwin. Menteri Pertahanan Indonesia saat itu, Purnomo Yusgiantoro memberikan komentar yang cukup khas dengan pandangan menyambut baik rebalancing Amerika Serikat-

China di Asia menjadi Indo-Pasifik. Hal ini diperlukan untuk stabilitas regional, keseimbangan dinamis dan menjaga keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik.

- ***Memajukan Konsep Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka***

Pada tahun 2021, menteri luar negeri Amerika Serikat Antony J. Blinken dengan lantang menjelaskan konsep Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka di Universitas Indonesia sebagai awal kerjasama. Blinken mendefinisikan bahwa Kebebasan adalah kemampuan untuk menentukan masa depan dan memiliki suara tentang apa yang terjadi di dalam masyarakat dan negara. Keterbukaan secara alami berasal dari kebebasan. Tempat yang bebas adalah tempat yang terbuka bagi informasi dan sudut pandang baru; terbuka terhadap budaya, agama, cara hidup yang berbeda; terbuka terhadap kritik, refleksi diri, demikian juga terhadap pembaruan.

Gambar 14. Pidato Blinken di Universitas Indonesia



Sumber: US Embassy Government (2021)

Ini menjelaskan bahwa Blinken mengajak Indonesia di kawasan Indo-Pasifik mulai pada tingkat individu untuk bebas dan terbuka dalam kehidupan sehari-hari. Pada tingkat negara, masing-masing negara akan dapat memilih jalan mereka sendiri dan mitra mereka sendiri. Dan pada tingkat regional, masalah di bagian dunia ini akan ditangani secara terbuka, aturan akan ditegakkan secara transparan dan diterapkan secara adil, barang melintas bebas melalui daratan, dunia dan laut lepas serta tiap-tiap orang bebas menyampaikan gagasan di media manapun. Terlebih untuk bisa memelihara dan menjaga kawasan China yang sentris China di Indo-Pasifik.

China menimbulkan begitu banyak kekhawatiran dari Asia timur laut hingga Asia tenggara dan dari Sungai Mekong hingga Kepulauan Pasifik tentang tindakan agresifnya mengklaim laut lepas sebagai miliknya, mendistorsi pasar terbuka melalui subsidi kepada perusahaan milik China, menolak ekspor atau mencabut kesepakatan terhadap negara-negara yang kebijakannya tidak sejalan, terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak teregulasi. Negara-negara di kawasan Indo-Pasifik khususnya Indonesia dan Amerika Serikat menghendaki agar perilaku ini berubah.

Jika perluasan China dikawasan Indo-Pasifik khususnya tidak diatasi maka bisa dipastikan China dapat mengancam pergerakan perdagangan senilai lebih dari 3 triliun dolar setiap tahun. Di dalam jumlah 3 triliun dolar yang sangat besar terdapat mata pencaharian dan kesejahteraan jutaan orang di seluruh dunia. Ketika kegiatan perdagangan tidak dapat melintasi laut lepas, itu berarti para petani tidak dapat mengirim produk mereka; pabrik-pabrik tidak dapat mengirimkan mikro chip mereka; rumah sakit tidak mendapatkan obat-obatan yang dapat menyelamatkan jiwa manusia.

- ***Membangun Indo-Pasifik yang lebih tangguh saat pandemi.***

Pandemi COVID-19 dan krisis iklim telah mempertegas bagaimana mendesaknya tugas-tugas Negara di dunia. Pandemi telah merenggut nyawa ratusan ribu orang di seluruh kawasan Indo-Pasifik termasuk lebih dari 143.000 pria, wanita, dan anak-anak Indonesia. Pandemi Covid juga menimbulkan korban ekonomi besar-besaran mulai dari penutupan pabrik hingga pariwisata yang terhenti. Untuk mencegah keterpurukan Indonesia secara Kesehatan dan Ekonomi Indonesia melakukan kerjasama dengan Amerika dalam pengembangan teknologi vaksin berbasis messenger RNA (mRNA).

Amerika Serikat juga telah membantu Indonesia berjuang menghadapi pandemi dalam negeri. Dari 300 juta dosis vaksin yang aman dan efektif yang telah didistribusikan oleh Amerika Serikat ke seluruh dunia lebih dari 100 juta dosis ke Indo-Pasifik dan lebih dari 25 juta dari jumlah itu telah tiba di Indonesia termasuk 77 juta dolar bantuan di Indonesia yang mencakup mulai dari alat pelindung diri Alat Pelindung Diri (APD) hingga oksigen medis untuk rumah sakit. Dengan meluncurkan Global COVID Corps Amerika Serikat menyediakan keahlian, alat dan kemampuan untuk mendukung upaya logistik dan vaksin di negara-negara berkembang, termasuk sampai pengiriman tahap akhir yang sangat penting agar benar-benar dapat disuntikkan.

Dengan banyaknya bantuan yang di berikan Amerika Serikat, Indonesia siap bekerjasama dalam memerangi virus dan membangun kembali sistem kesehatan yang lebih baik di Indo-Pasifik, di seluruh dunia untuk mencegah, mendeteksi dan merespons pandemi berikutnya. Amerika Serikat juga telah bekerja bersama para

mitra untuk memperkuat sistem kesehatan di kawasan ini selama beberapa dekade. Di ASEAN saja, Amerika Serikat telah menginvestasikan lebih dari 3,5 miliar dolar untuk kesehatan masyarakat selama 20 tahun terakhir. Untuk itu, Indonesia berterima kasih secara khusus atas dukungan AS untuk Indonesia selama pandemic.

- ***People to People***

Amerika Serikat dan Indonesia, sebagai dua negara demokrasi yang berbeda, berkomitmen untuk mengembangkan masyarakat sipil yang kuat, pers yang bersemangat dan peluang bagi perempuan dan minoritas. Kepemimpinan bersama antar kedua negara dalam kemitraan pemerintah terbuka mencerminkan komitmen kuat mereka untuk mempromosikan tata pemerintahan yang baik dan transparansi untuk kepentingan warga negara dan untuk berbagi pengalaman dengan negara-negara demokrasi yang sedang berkembang melalui kerja sama segitiga.

Kedua Presiden juga berkomitmen untuk memperluas dan memperdalam hubungan *people to people* antara kedua negara termasuk melalui promosi pertukaran pendidikan dan pariwisata. Presiden Obama menyambut baik kebijakan Indonesia untuk memperpanjang pengaturannya bebas visa bagi warga AS dalam kunjungan jangka pendek. Amerika Serikat dan Indonesia akan mempertimbangkan cara-cara untuk memperpanjang validitas visa non-imigran yang dikeluarkan untuk warga negara Indonesia yang bepergian ke Amerika Serikat untuk pariwisata dan bisnis serta validitas visa pelajar dan pertukaran pengunjung yang dikeluarkan untuk warga negara AS yang bepergian ke Indonesia.

Amerika Serikat dan Indonesia berkomitmen untuk memajukan kerjasama bilateral dalam penelitian ilmiah dan kemitraan pendidikan tinggi melalui perluasan peluang kerjasama ilmuwan-ke ilmuwan di bidang prioritas yang digariskan oleh Perjanjian Sains dan Teknologi termasuk perlindungan laut, teknologi pertanian, kesehatan dan energi terbarukan. Sebagai inti dari dukungan kerja sama ini, pembentukan Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia merupakan tonggak sejarah dalam perkembangan ilmu pengetahuan Indonesia dan penciptaan peluang baru untuk menghubungkan penelitian Indonesia dengan komunitas ilmiah global.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan AS memasuki level baru yang lebih tinggi pada tahun 2015. Dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Washington,

D.C. pada bulan Oktober 2015, Indonesia dan AS sepakat untuk memperluas dan meningkatkan kerjasamanya menjadi Kemitraan Strategis. Kemitraan akan menjadi jalan untuk menangani isu-isu yang lebih strategis di tingkat tertinggi. Ini akan menciptakan peluang untuk memperdalam kontribusi dan kolaborasi bersama Indonesia dan AS dalam isu-isu bilateral, regional dan global.

Kemitraan berfokus pada enam bidang kerja sama: Kerja Sama Maritim; Kerjasama Pertahanan; Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi; Kerjasama Energi; Meningkatkan Kerjasama dalam Isu Global dan Regional; dan Kontak Orang ke Orang. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Joko Widodo juga berkesempatan menyaksikan penandatanganan kesepakatan bisnis senilai lebih dari US\$ 22 miliar. Di bawah kerjasama Track II, pada tanggal 11 Agustus 2016, Perhimpunan Indonesia-Amerika Serikat (USINDO) dan para pemimpin non-pemerintah Indonesia dan Amerika dari sektor agama, akademik dan non-pemerintah masing-masing negara, mengumumkan pembentukan sebuah badan independen, bi-nasional, non-pemerintah, Dewan Agama dan Pluralisme Indonesia AS, di Yogyakarta, Indonesia. Bidang minat, pengalaman, dan perhatian bersama Dewan, adalah: 1) Meningkatkan pemahaman keagamaan, saling menghormati, dan kerjasama; 2) Menumbuhkan model pendidikan kewarganegaraan dan agama yang positif; dan 3) Memberdayakan masyarakat sipil untuk mencegah ekstremisme kekerasan.

4.5.2 Kerjasama Ekonomi

1. General System of Preferences (GSP)

Pasca perang dagang dengan Amerika Serikat-China di tahun 2018, Presiden Trump melakukan evaluasi terhadap produk dari 16 negara berkembang termasuk Indonesia melalui *General System of Preferences (GSP)*. GSP adalah kebijakan perdagangan suatu negara yang memberi pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima. Ini merupakan kebijakan perdagangan sepihak (unilateral) yang umumnya dimiliki negara maju untuk membantu perekonomian negara berkembang tetapi tidak bersifat mengikat bagi negara pemberi maupun penerima. Negara pemilik program GSP bisa bebas menentukan negara mana dan

produk apa yang akan diberikan. Bagi AS, GSP adalah salah satu alat politik luar negeri untuk menjaga pengaruh dan dominasi globalnya.

Indonesia pertama kali mendapat GSP pada 1980. Fasilitas GSP resmi diperpanjang oleh AS untuk Indonesia pada November 2020. Fasilitas GSP harus terus diperkuat pelaksanaannya karena akan menguntungkan kedua negara. Pada Januari-Agustus 2020, nilai ekspor Indonesia yang menggunakan fasilitas GSP tercatat 1,87 miliar dollar AS atau naik 10,6 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019. Indonesia juga telah memiliki kelompok kerja peningkatan ekspor untuk isu GSP dan non-GSP, mengajukan proposal perjanjian dagang akses GSP tanpa syarat dan revitalisasi dialog perdagangan dan investasi pada paruh pertama 2021.

AS merupakan mitra dagang terbesar ke-4 bagi Indonesia setelah China, Jepang dan Singapura. Adapun komoditas dari Indonesia yang diekspor ke AS antara lain makanan laut, karet, sepatu kulit, baju, alas kaki, furniture dan minyak kelapa sawit. Selain itu, Indonesia juga akan terus mendorong pembentukan *Limited Trade Deal* (LTD). Kesepakatan ini berpotensi mendongkrak volume perdagangan Indonesia-AS hingga mencapai 60 miliar dollar AS dalam beberapa tahun ke depan.

Tabel 7. Nilai Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat Tahun 2015-2020 (dalam miliar dolar AS)

	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Ekspor	16,24	16,14	17,79	18,44	17,84	16,75
Impor	7,59	7,30	8,12	10,18	9,26	7,77
Total	23,83	23,44	25,92	28,62	27,11	24,52
Neraca	8,65	8,84	9,67	8,26	8,58	8,98

Sumber: Bisnis Indonesia (2020)

Berdasarkan Tabel 1, total perdagangan Indonesia-AS sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 menunjukkan adanya peningkatan dan Indonesia pun memperoleh surplus dari perdagangan Dua negara. Nilai perdagangan Indonesia-AS mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 akibat pandemi Covid-19 yang memberikandampak negatif terhadap perekonomian di seluruh dunia. Kendati mengalami penurunan terkait nilai perdagangan namun Indonesia masih

memperoleh keuntungan dari kerja sama perdagangan dari kedua negara. Dari tabel ini juga diketahui bahwa sepanjang Januari-November tahun 2020, nilai perdagangan Indonesia dan AS tercatat senilai 24,52 miliar dollar AS. Dari nilai ini, Indonesia mengalami surplus perdagangan hampir sebesar 9 miliar dollar AS. Ekspor non-migas Indonesia ke AS telah mencapai 16,75 miliar dollar AS sepanjang Januari-November 2020.

Jumlah ini meningkat 3,82 persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya kepada negara berkembang. Indonesia mendapat fasilitas GSP sejak tahun 1976 dengan kategori A sehingga mendapatkan potongan bea masuk untuk 3.500 produk, termasuk produk pertanian dan perkayuan. GSP akan diberikan sampai Indonesia dinilai tidak lagi menjadi negara penerima karena sudah melampaui ambang batas *Competitive Need Limitation* (CNL) yang ditentukan, atau sampai periode program GSP berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Kendati mengalami penurunan terkait nilai perdagangan, namun Indonesia masih memperoleh keuntungan dari kerja sama perdagangan dari kedua negara. Dari tabel ini juga diketahui bahwa sepanjang Januari-November tahun 2020, nilai perdagangan Indonesia dan AS tercatat senilai 24,52 miliar dollar AS. Dari nilai ini, Indonesia mengalami surplus perdagangan hampir sebesar 9 miliar dollar AS. Ekspor non-migas Indonesia ke AS telah mencapai 16,75 miliar dollar AS sepanjang Januari-November 2020. Jumlah ini meningkat 3,82 persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) mencapai USD1,48 miliar atau setara Rp21,16 triliun (Kurs Rp14.300 per USD) pada periode Januari-Mei 2021. Capaian ekspor tersebut berkat fasilitas Generalized System of Preference (GSP) dari negara Paman Sam. Adapun beberapa produk unggulan GSP Indonesia ke Amerika Serikat adalah karet, plastic, kalung dan rantai emas serta barang elektronik dan mesin.

2. Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)

Dalam kerjasama perdagangan bilateral sejak tahun 1998, Indonesia dan AS telah memiliki MoU Kerjasama *Trade and Investment Framework Agreement* (TIFA). TIFA berfungsi sebagai forum untuk membahas isu-isu terkait perdagangan dan investasi antara kedua Negara (Indonesia-Amerika Serikat). Di

bawah TIFA, delegasi dari Indonesia dan AS bertemu setiap tahun di tingkat pejabat senior dan/atau Kabinet. TIFA Indonesia-AS memiliki empat *Working Group* (WG), yaitu WG untuk Produk Industri dan Pertanian; WG tentang Penebangan Liar dan Perdagangan Terkait; WG tentang Hak Kekayaan Intelektual; dan WG tentang Investasi.

Setelah Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia diumumkan pada tahun 2010, hasil pertemuan TIFA telah dibagikan dan dilaporkan ke Pertemuan Komisi Gabungan AS dan Indonesia, yang diketuai bersama oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri AS. Amerika Serikat adalah pemasok utama peralatan transportasi pesawat dan kereta api serta berbagai peralatan untuk mengembangkan sektor energi Indonesia. Ekspor pertanian AS ke Indonesia berada di jalur yang tepat untuk melampaui \$3 miliar pada tahun 2011 berjalan 53 persen lebih cepat dari tahun lalu. Perusahaan AS telah menyatakan niat mereka untuk membuka atau membuka kembali pabrik di Indonesia dengan investasi gabungan lebih dari \$450 juta.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan Indonesia, Indonesia kemudian unggul dalam perdagangan dengan Amerika Serikat pada tahun 2016 dengan surplus perdagangan sebesar USD\$8,4 miliar. Surplus ini bahkan memicu perintah dari Presiden AS Donald Trump pada Maret 2017 untuk melakukan tinjauan komprehensif terhadap ketidakseimbangan perdagangan antara AS dan Indonesia karena menurut Trump dapat terjadi kasus penyalahgunaan perdagangan yang menyebabkan defisit perdagangan AS. Itu adalah pernyataan blak-blakan dari presiden baru AS yang sekarang telah menjabat selama lebih dari 100 hari.

Pada tahun 2016 ekspor Indonesia ke AS naik 2 persen tahun ke tahun menjadi USD 16,1 miliar, sebagian besar terdiri dari pengiriman tekstil (dan produk tekstil), alas kaki dan minyak sawit mentah (CPO). Sementara impor Indonesia dari AS turun 10,5 persen menjadi USD \$7,3 miliar. Impor ke Indonesia sebagian besar melibatkan peralatan elektronik, mesin, produk otomotif dan produk IT. Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mengatakan kesepakatan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat sangat penting bagi Indonesia, terutama karena akan meningkatkan daya

saing Indonesia. Saat ini, Vietnam karena perjanjian perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat-lebih kompetitif dalam perdagangan dengan ekonomi top dunia dibandingkan dengan Indonesia. Apalagi perdagangan antara Indonesia dan AS bersifat komplementer dalam arti produk Indonesia yang dikirim ke AS tidak diproduksi di AS, sedangkan produk AS yang diimpor ke Indonesia sebagian besar tidak diproduksi di Indonesia.

Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang stabil selama dekade terakhir, rata-rata antara 5-6 persen dengan inflasi moderat, meningkatnya investasi asing langsung dan suku bunga yang relatif rendah. Defisit anggaran tahunan Indonesia dibatasi pada 3 persen dari PDB dan Pemerintah Indonesia menurunkan rasio utang terhadap PDB dari puncaknya 100 persen tidak lama setelah krisis keuangan Asia pada tahun 1999 menjadi 30,1 persen pada tahun 2018. Kelas menengah Indonesia yang sedang tumbuh, permintaan domestik yang kuat, populasi yang besar dan muda dan kebutuhan akan infrastruktur baru menjadikannya pasar potensial yang penting bagi produk dan investasi AS.

Perdagangan barang bilateral AS dengan Indonesia berjumlah lebih dari 29 miliar dolar pada tahun 2018, sementara perdagangan bilateral di bidang jasa diperkirakan berjumlah 3,9 miliar dolar. Ekspor utama AS ke Indonesia meliputi kedelai, pesawat terbang, bahan bakar mineral, mesin dan kapas. Stok investasi asing langsung AS di Indonesia adalah 11,1 miliar dolar pada 2018, sementara investasi Indonesia di Amerika Serikat untuk periode yang sama adalah 350 juta dolar. Amerika Serikat terus terlibat dengan Indonesia untuk memajukan prioritas reformasi ekonomi seperti memperkuat iklim investasi dan mengurangi hambatan perdagangan, seperti undang-undang proteksionis, infrastruktur yang terbatas dan struktur hukum yang diterapkan tidak merata.

Hingga akhirnya disimpulkan bahwa defisit perdagangan barang AS dengan Indonesia adalah 12,8 miliar dolar pada tahun 2020, meningkat 3,2 persen (397 juta dolar) selama tahun 2019. Ekspor barang AS ke Indonesia adalah 7,4 miliar dolar, turun 4,1 persen (317 juta dolar) daritahun sebelumnya. Impor AS yang sesuai dari Indonesia adalah 20,2 miliar dolar naik 0,4 persen. Indonesia adalah pasar ekspor

barang terbesar ke-33 Amerika Serikat pada tahun 2020. Ekspor jasa AS ke Indonesia diperkirakan 2,8 miliar dolar pada tahun 2019 dan impor AS adalah 1,1 miliar dolar. Penjualan layanan di Indonesia oleh sebagian besar afiliasi milik AS mencapai 2,8 miliar dolar pada tahun 2018 (terbaru data tersedia) sementara penjualan layanan di Amerika Serikat oleh sebagian besar perusahaan milik Indonesia adalah 120 juta dolar. Investasi asing langsung AS di Indonesia (saham) mencapai 12,2 miliar dolar pada 2019, meningkat 18,7 persen dari 2018. Investasi langsung AS di Indonesia dipimpin oleh pertambangan, manufaktur dan kepemilikan non bank perusahaan.

4.5.3 Kerjasama Pertahanan

Amerika Serikat dan Indonesia telah menikmati lebih dari 70 tahun hubungan bilateral yang didasari pada memiliki kepentingan bersama. Salah satunya adalah mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang aman, makmur dan demokratis. Ditandai dengan Indonesia menandatangani beberapa perjanjian hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat, seperti: *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) dan *Communications Interoperability and Security Memorandum of Agreement* (CISMOA). Perjanjian dasar ini membentuk kerangka kerja untuk meningkatkan kemitraan, berbagi informasi, dan kerja sama pertahanan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Indonesia adalah kontributor pasukan yang signifikan untuk operasi pemeliharaan perdamaian PBB dengan lebih dari 2.750 personel dikerahkan ke berbagai misi.

Hubungan Pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat telah diperluas dan diperdalam dalam beberapa dekade terakhir, berkat partisipasi yang konsisten dalam lusinan keterlibatan tahunan dan kerja sama di bidang keamanan perbatasan, kontra proliferasi, keamanan siber, kontraterorisme, keamanan maritim, kesadaran domain maritim, operasi penjaga perdamaian, dan bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana. Departemen Pertahanan Amerika Serikat memberi Indonesia lebih dari 5 juta dollar dalam dukungan pengembangan kapasitas kelembagaan pertahanan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Layanan ini berfokus pada peningkatan sumber daya manusia untuk perencanaan strategis, penganggaran, keberlanjutan dan keamanan maritim.

Bahkan di tengah pandemi Indonesia menerima kiriman 500 ventilator dari U.S. Agency for International Development. Kontribusi pemerintah AS lebih dari 12 juta dolar dalam bantuan COVID-19 ke Indonesia selain 1.000 ventilator adalah bukti kekuatan hubungan antara kedua negara yang mencerminkan banyak cara militer negara bekerja sama untuk memajukan kepentingan bersama. Berikut beberapa kerjasama Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik:

3. *Kerjasama Maritim*

Sejak Amerika Serikat mencabut embargo militernya terhadap Indonesia pada tahun 2006, kerja sama pertahanan antara Indonesia dan AS terus meningkat baik dari segi jumlah kegiatan, ruang lingkup kerjasama maupun tingkat keterlibatannya. Sebagai gambaran, pada 2011-2016 setidaknya ada 998 kegiatan pertahanan dan keamanan bersama yang dilakukan oleh pejabat militer Indonesia dan AS. Indonesia dan AS telah menyelenggarakan pertemuan militer tahunan melalui Dialog Keamanan Indonesia-Amerika Serikat (IUSDD) sejak 2002, di mana para pejabat tinggi militer kedua negara meninjau kerja sama bilateral mereka, serta bertukar pandangan tentang regional dan global. masalah keamanan. Pertemuan terbaru, IUSDD ke-14, diadakan di Washington, DC pada 1-2 September 2016.

Pada tahun 2015, Menhan RI dan Menhan AS menandatangani pernyataan bersama yang menetapkan fokus kegiatan yang akan dilakukan untuk memajukan kerja sama kedua negara, sebagai berikut: 1. Kerjasama Maritim; 2. Pengadaan Pertahanan dan Penelitian dan Pengembangan Bersama; 3. Meningkatkan Profesionalisme; 4. Kerjasama Operasi dan Pelatihan Pemeliharaan Perdamaian; 5. Bantuan Kemanusiaan dan Tanggap Bencana; dan 6. Melawan Ancaman Trans-Nasional.

Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sepakat memperdalam kerja sama maritim dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dan Menlu AS Antony Blinken di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta. MoU kerja sama keamanan maritime mencakup, sumber daya kelautan, konservasi dan pengelolaan perikanan serta keselamatan dan navigasi maritim. Selain itu guna memperkuat kerja sama di bidang keamanan kedua negara juga